

**PENGENDALIAN INTERN PIUTANG DALAM MENGELOLA
PIUTANG MACET (STUDI KASUS PADA PNPM MANDIRI
KECAMATAN MEDANG DERAS KABUPATEN
BATUBARA)**

SKRIPSI

Oleh :

Nurazizah

NIM : 51.14.3.050

**Program Studi
AKUNTANSI SYARIAH**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

**PENGENDALIAN INTERN PIUTANG DALAM MENGELOLA
PIUTANG MACET (STUDI KASUS PADA PNPM MANDIRI
KECAMATAN MEDANG DERAS KABUPATEN
BATUBARA)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi
(S.Akun) Pada Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Oleh :

Nurazizah

NIM : 51.14.3.050

**Program Studi
AKUNTANSI SYARIAH**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda di bawah ini :

Nama : Nurazizah
Nim : 51.14.3.050
Tempat/tgl lahir : Sei Buah Keras, 13 April 1995
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Alamat : Jl. Tuamang No. 228 Sidorejo Hilir

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“PENGENDALIAN INTERN PIUTANG DALAM MENGELOLA PIUTANG MACET(STUDI KASUS DI PNPM MANDIRI BAGIAN SIMPAN PINJAM PEREMPUAN)”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 07 Oktober 2018



Yang membuat pernyataan

Nurazizah

PERSETUJUAN

Skripsi berjudul:

**SISTEM PENGENDALIAN INTERN PIUTANG USAHA DALAM
MENGELOLA PIUTANG MACET (STUDI KASUS DI PNPM MANDIRI
KECAMATAN MEDANG DERAS KABUPATEN BATUBARA)**

Oleh:

Nurazizah

NIM. 51141070

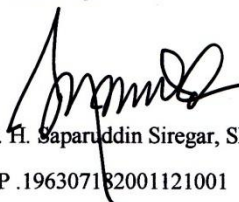
Dapat Disetujui Dengan Salah Satu Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)


Pada Jurusan Akuntansi Syari'ah

Medan, 05 Oktober 2018

Pembimbing I

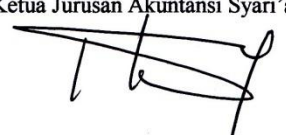

Dr. H. Saparuddin Siregar, SE, M.Ag
NIP. 196307132001121001

Pembimbing II


Aqwa Naseef Daulay M, Si
NIB. 1100000091

Mengetahui


Ketua Jurusan Akuntansi Syari'ah


Hendra Harmain, SE, M, pd
NIP. 197305101998031003


Skripsi berjudul **"PENGENDALIAN INTERN PIUTANG DALAM MENGELOLA PIUTANG MACET PADA PNPM MANDIRI KECAMATAN MEDANG DERAS KABUPATEN BATUBARA"**. Nurazizah, NIM. 51143050 Prodi Akuntansi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tanggal 26 Oktober 2018. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) pada Prodi Akuntansi Syariah.

Medan, 26 Oktober 2018
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Prodi Ekonomi Islam UIN-SU

Ketua

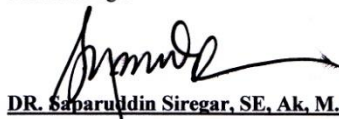

DR. Sugianto, MA
NIP. 196706072000031003

Sekretaris

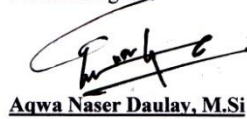

Kusma Ikwaty, M.Ak
NIP. 198006142015032001

Anggota

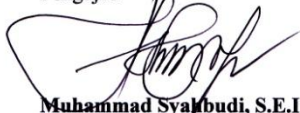
Pembimbing I


DR. Saparuddin Siregar, SE, Ak, M.Ag
NIP. 196307182001121001


Pembimbing II


Aqwa Naser Daulay, M.Si
NIB. 1100000091

Penguji I


Muhammad Syahbudi, S.E.I, MA
NIB. 1100000094

Penguji II


Yasrizal, SE, M.Si
NIP. 197505222009011006

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sumatera Utara


DR. Andri Soemitra, MA
NIP. 197605072006041002

ABSTRAK

Skripsi berjudul **“Sistem pengendalian Intern Piutang dalam Mengelola Pitang Macet (Studi Kasus PNPM Mandiri Bagian Simpan Pinjam Perempuan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara)”** atas nama Nurazizah. Dibawah Bimbingan Pembimbing I bapak **Dr. H. Saparuddin Siregar, SE, M.Ag** dan Pembimbing II bapak **Aqwa Naser Daulay, M.Si**

PNPM Mandiri adalah program yang dirancang pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Salah satu program yang dilakukan PNPM Mandiri yaitu SPP (Simpan Pinjam Perempuan) yang dirancang dengan tujuan memberikan kesempatan bagi kaum perempuan dalam meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha dengan sistem kredit tanggung renteng. Namun, pemberian kredit menimbulkan risiko yang cukup besar dimana akan terjadinya keterlambatan dalam pelunasan sehingga menimbulkan piutang macet. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pengendalian intern yang diterapkan di PNPM Mandiri bagian SPP Kecamatan Medang Deras dalam pengelolaan piutang macetnya di lembaga tersebut. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi langsung dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena apa adanya yang ada pada sistem pengendalian intern piutang dalam mengelola piutang macet pada PNPM Mandiri bagian SPP Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Penerapan sistem pengendalian piutangnya sudah cukup bagus yaitu dengan tanggung renteng, selain itu juga mekanisme penyaluran maupun pengembalian dan persyaratan mudah dilakukan dan tanpa jaminan. Dana bergulir yang dipraktekkan juga menjamin keberlangsungan piutang oleh UPK karena dana yang dikucurkan akan terus bergulir dari satu kelompok ke kelompok yang lainnya. (2) Keefektifan dalam menganalisa rasio perhitungan kolektibilitas yang ada pada laporan kolektibilitas pinjaman SPP, berdasarkan analisis kolektibilitas selama 3 tahun terakhir rata-rata persentase kolektibilitas untuk kategori lancar sebesar 61,34%, adapun angka rata-rata kredit *nonperforming loannya* berada pada angka 32% dan masuk kedalam kategori risiko tinggi (high) yang artinya belum dapat dikatakan cukup efektif dalam pengelolaan piutangnya.

Kata Kunci: Sistem Pengendalian Intern, Piutang, Pengelolaan Piutang Macet.

KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Taufiq dan Hidayah Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul **“Sistem Pengendalian Intern Piutang Dalam Mengelola Piutang Macet di PNPM Mandiri bagian SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Kecamatan Medang Deras Kabupten Batubara”**

Adapun maksud dari penulisan dari proposal ini adalah sebagai salah satu syarat untuk disetujui sebagai langkah awal penyusunan skripsi yang ditujukan dalam rangka meraih gelar Sarjana 1 (S1) jurusan Akuntansi Syariah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Atas berkat bantuan dari berbagai pihak yang telah berkenan untuk memberikan segala yang dibutuhkan dalam penulisan proposal ini, saya ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan penulisan ini.
2. Bapak Dr. Andri Soemitra, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam karena telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengikuti kegiatan perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Saparuddin Siregar SE, M.Ag selaku Pembimbing Skripsi I penulis yang telah berkenan mengarahkan dan sabar dalam membimbing penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
4. Bapak Aqwa Naser Daulay M,Si selaku pembimbing Skripsi II penulis yang telah berkenan mengarahkan dengan sabar dalam membimbing penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
5. Bapak Hendra Harmain, M.pd selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

sekaligus Penasehat Akademik yang telah dengan sabar membimbing saya sehingga terselesaikannya proposal skripsi ini.

6. Segenap Bapak Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
7. Bapak Ramlis, SH selaku Camat Medang Deras yang telah memberikan izin riset kepada penulis sehingga penulis dapat melakukan penelitian di Mandiri bagian SPP Kecamatan Medang Deras Kabupten Batubara.
8. Pihak UPK selaku staff di PNPM Mandiri bagian SPP Kecamatan Medang Deras Kabupten Batubara yang sudah mau menerima saya untuk diwawancarai dalam penyiapan skripsi saya.
9. Kedua orang tua yang tercinta ayah dan ibu yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan baik moril maupun materil selama perkuliahan penulis dan juga selama penulisan skripsi ini.
10. Abanganda dan adik-adik saya yang membuat penulis semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
11. M. Rizky Ramadhan Rawie, M. Anwar Zaki yang telah mau mengantar penulis kemanapun dan memberikan support dalam pengerjaan skripsi ini.
12. Khaliza Rahmadani, Nur Insan Hsb dan Sri Darmayanti selaku grup “ototubbies” yang telah membantu, mensupport, dan memberikan semangat kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
13. Lili Syafitri, Laila Rahmadani Mtd, Nur Hajjah Hrp, Zatta Gassani, Herawati, Yuni Sarah, Mayang Sari Nasution, Nurul Ramadani yang selalu mengingatkan dan menyuruh penulis untuk membuat skripsi ini.
14. Teman-teman Angkatan 2014 Jurusan Akuntansi Syariah kelas B.
15. Dan semua pihak yang berkenan membantu penulis yang mungkin tidak bisa saya sampaikan satu-persatu saya ucapkan terimakasih.

Medan, 05 Oktober 2018

Nurazizah

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN.....	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	4
C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	4
D. BATASAN ISTILAH	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. KONSEP DASAR PIUTANG	7
1. Pengertian Piutang dan Jenisnya	7
2. Latar Belakang Terjadinya Utang Piutang	9
3. Kredit.....	9
4. Kolektibilitas Kredit atau Penggolongan Kualitas Kredit.....	11
5. Faktor-faktor Penyebab Piutang Macet.....	13
6. Prosedur Penagihan Piutang.....	14
7. Teknik Penyelesaian Piutang Bermasalah.....	15
B. KONSEP PENGENDALIAN INTERN.....	17
1. Pengertian Pengendalian Intern.....	17
2. Prinsip Dasar Pengendalian Intern	19
3. Tujuan Pengendalian Intern.....	21
4. Keterbatasan Pengendalian Intern	23
5. Konsep Pengendalian Intern Piutang Usaha.....	25

C. PENELITIAN TERDAHULU	32
D. FLOWCHART PENELITIAN.....	37

BAB III METODE PENELITIAN

A. PENDEKATAN PENELITIAN.....	40
B. LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN	41
C. SUBJEK DAN OBJEK PENELITIAN.....	41
D. JENIS DAN SUMBER DATA	41
E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	42
F. METODE ANALISIS DATA.....	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....	45
1. Sekilas Mengenai Lokasi Penelitian.....	45
2. Profil Singkat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.....	46
3. Unit Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri	48
4. Gambaran Umum dan Prosedur Simpan Pinjam Perempuan.....	51
5. Mekanisme Pelaksanaan Simpan Pinjam Perempuan (SPP).....	52
6. Ketentuan dan Pelaksanaan Pencairan Dana	54
7. Pelaksanaan Sistem Tanggung Renteng SPP	55
8. Sanksi Tunggakan Pembayaran Pinjaman.....	5
B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	56
1. Analisis Sistem Pengendalian Intern Piutang yang Diterapkan Oleh UPK Kec. Medang Deras Kab. Batubara	56
2. Analisis Kolektibilitas Piutang pada UPK Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara	62
3. Analisis Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Intern Piutang pada UPK SPP Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara.....	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

TABEL

1. 1.1 Perkembangan jumlah piutang dan piutang macet PNPM Mandiri bagian SPP Kecamatan Medang Deras Kabupten Batubara Tahun 2015 - 2017.....	4
2. 2.1 Penggolongan kolektibilitas	13
3. 2.2 Penelitian Terdahulu	33
4. 4.1 Kolektibilitas Berdasarkan Saldo Pinjaman UPK Kec. Medang Deras Kab. Batubara.....	60
5. 4.2 Data Penggolongan Kolektibilitas UPK Kec. Medang Deras Kab. Batubara Periode Tahun 2015 s/d 2017	61
6. 4.3 Rasio Kolektibilitas Kredit Terhadap Total Kredit Tahun 2015 s/d2017	64
7. 4.4 Data Nonperforming Loan UPK SPP Kec. Medang Deras Kab. Batubara Tahun 2015 s/d 2017	65
8. 4.5 Total Kredit Kategori KL, D, dan M UPK SPP Kec. Medang Deras Kab. Batubara.....	66
9. 4.6 Hasil Perhitungan Nonperforming Loan UPK SPP Kec. Medang Deras Kab. Batubara Periode 2015 s/d 2017	67
10. 4.7 Analisa Data Kolektibilitas UPK SPP Kec. Medang Deras Kab. Batubara Tahun 2015 s/d 2017	67

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR

1. Flowchart Penelitian 38
2. Gambar 2. Struktur Kepengurusan UPK di Kec. Medang Deras Kab.
Batubara 49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan perusahaan adalah untuk mencapai laba yang maksimal. Melalui pendapatan yang diperoleh, perusahaan dapat terus beroperasi dan mengembangkan usahanya. Siklus pendapatan terutama piutang usaha perlu diperhatikan untuk mengurangi risiko yang mungkin terjadi. Salah satu risiko yang mungkin terjadi seperti piutang macet.

Piutang adalah jumlah klaim atau tagihan kepada pihak lain dalam bentuk uang, barang atau jasa yang dapat diterima dalam jangka waktu satu tahun atau dalam siklus kegiatan perusahaan.¹

Piutang merupakan salah satu jenis aktiva lancar yang tercantum pada neraca. Sejumlah investasi perusahaan sebagian besar terdapat pada piutang, investasi tersebut tidak dapat ditemukan pada jenis aktiva lancar lainnya. Pemberian piutang juga menimbulkan risiko yang cukup besar dimana akan terjadi ketelambatan dalam pelunasan sehingga menimbulkan piutang macet. Begitu juga dengan pengelolaan piutang yang ada di PNPM Mandiri Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara.

PNPM Mandiri (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam lingkup kegiatan berdasarkan prinsipnya meliputi peningkatan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin perdesaan secara mandiri melalui peningkatan partisipasi masyarakat (terutama masyarakat miskin dan kelompok perempuan). Salah satu program yang dilakukan PNPM Mandiri yaitu SPP (Simpan Pinjam untuk kelompok Perempuan).

¹ Hengki Irawan Setia Budi, *Bijak Mengelola piutang Smart In Accounting Receivable*, Jakarta : PT Alex Media Komputindo, 2011, h.3

Sejak tahun 2009 Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara telah melakukan program SPP yang mana program tersebut diadakan untuk membantu masyarakat khususnya kelompok perempuan dalam mengembangkan atau menciptakan usaha untuk membangun kesejahteraan hidup.

Sistem peminjaman pada SPP harus disertai dengan kelompok dan setiap kelompok berisikan 5 s/d 7 orang, kemudian setiap kelompok mempunyai kepengurusan yang jelas minimal ketua untuk menagih hutang di kelompok tersebut, mempunyai usaha mikro atau kegiatan ekonomi karena SPP memang diperuntukkan bagi masyarakat yg ingin membuka usaha, anggota kelompok peminjam wajib mendapatkan persetujuan dari salah satu anggota keluarga dan mencantumkan tandatangan pihak keluarga yg setuju, kelompok lunas yang akan mengajukan kembali pinjaman harus dinilai kondisi pinjamannya.²

Setiap melakukan pinjaman pasti ada saja yg melakukan penunggakan pembayaran diluar jatuh tempo dan inilah yang menjadi salah satu alasan terjadinya piutang macet. Kasus yang seperti ini menjadi salah satu risiko yang harus ditangani dengan tegas karena pinjaman yang seharusnya sudah lunas disaat jatuh tempo akan digulirkan kembali ke kelompok lain atau kelompok baru yang ingin melakukan pinjaman.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh langsung dari kantor PNPM Mandiri bagian SPP Kecamatan Medang Deras Kabupten Batubara, peneliti mendapatkan data perkembangan total jumlah piutang dan besaran piutang macet PNPM Mandiri bagian SPP Kecamatan Medang Deras Kabupten Batubara selama tiga tahun terakhir sebagai berikut :

² Suhartina, Ketua UPK PNPM Mandiri Bagian SPP, wawancara di Kantor PNPM Mandiri SPP Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara, Tanggal 11 Agustus 2018.

Tabel 1.1 Perkembangan jumlah piutang dan piutang macet PNPM Mandiri bagian SPP Kecamatan Medang Deras Kabupten Batubara Tahun 2015 - 2017

Tahun	Jumlah Piutang (Dalam Rupiah)	Jumlah Piutang macet	Persentase Piutang macet (%)
2017	1.849.182.000	220.515.000	11,92%
2016	1.354.281.000	74.714.000	5,51%
2015	1.109.137.000	74.510.000	6,71%

Sumber : PNPM Mandiri bagian SPP Kecamatan Medang Deras Kabupten

Batubara

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase piutang macet PNPM Mandiri bagian SPP Kecamatan Medang Deras Kabupten Batubara dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 terus mengalami peningkatan walaupun pada tahun 2016 mengalami penurunan namun pada tahun 2017 naik lagi bahkan lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Salah satu penyebabnya yaitu kurang tegasnya sistem penagihan yang dilakukan oleh pihak yang bertugas menagih hutang di setiap kelompok sehingga setiap kelompok merasa anggap remeh pada pembayaran hutangnya dan menganggap bisa dibayar dikemudian hari saja walaupun pembayaran sudah jatuh tempo. Faktor lain yang menyebabkan piutang macet menjadi tinggi yaitu adanya penggandaan tugas pada kepengurusan UPK yang berada di PNPM mandiri yang hanya berjumlah tiga orang yang menjadikan pengelolaan pembagian tugas menjadi tidak efektif.

Piutang macet atau *Non Performing Loan (NPL)*, menjadi salah satu penyakit yang bisa menghambat perkembangan sektor jasa keuangan. Piutang macet disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal.

Menurut Veithzal, Faktor internal penyebab timbulnya piutang macet adalah penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur pengkreditan, I'tikad kurang baik dari pemilik, pengurus, atau pegawai bank, lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit serta lemahnya informasi piutang macet. Sedangkan faktor eksternal penyebab timbulnya piutang macet adalah kegagalan usaha debitur, musibah terhadap debitur atau terhadap kegiatan

usaha debitur, serta menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit.³

Dari penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh guna mengetahui bagaimana sebenarnya pengendalian intern piutang yang diterapkan pada PNPM Mandiri bagian SPP Kecamatan Medang Deras Kabupten Batubara, dan penelitian ini merupakan penelitian yang pertama kali dilakukan di UPK PNPM Mandiri bagian Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah judul “**Pengendalian Intern Piutang dalam Mengelola Piutang Macet pada PNPM Mandiri bagian SPP Kecamatan Medang Deras Kabupten Batubara**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

Bagaimanakah pengendalian intern piutang dalam mengelola piutang macet yang diterapkan di PNPM Mandiri bagian SPP Kecamatan Medang Deras Kabupten Batubara ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari penguraian perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui sistem pengendalian intern piutang dalam mengelola piutang macet yang diterapkan di PNPM Mandiri bagian SPP Kecamatan Medang Deras Kabupten Batubara

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari proses penelitian ini adalah sebagai berikut :

³ Veithzal Rivai, dkk, (*Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktik*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012), h.238.

- a. Bagi peneliti, untuk memperoleh pengetahuan yang lebih luas mengenai Sistem Pengendalian Intern Piutang.
- b. Bagi perusahaan, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan perusahaan mengenai sistem pengendalian intern piutang yang baik.
- c. Bagi Akademisi, sebagai bahan masukan peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan judul.

D. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian, maka peneliti sangat perlu untuk menjelaskan terlebih dahulu yang dimaksud dengan judul penelitian “Sistem Pengendalian Intern Piutang Dalam Mengelola Piutang Macet”. Adapun penjelasan sekaligus pembatasan istilah untuk masing-masing variabel tersebut adalah :

1. Pengendalian Intern

Pengendalian intern merupakan kegiatan yang sangat penting dalam pencapaian tujuan perusahaan. Demikian pula dunia usaha mempunyai perhatian yang makin meningkat terhadap pengendalian intern. Adapun definisi pengendalian intern yaitu sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh aktivitas dewan komisaris, manajemen atau pegawai lainnya yang didesain untuk memberikan keyakinan yang wajar tentang pencapaian tiga golongan tujuan yaitu; Keandalan pelaporan keuangan, Efektivitas dan efisiensi operasi, Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

2. Piutang Macet

Piutang adalah suatu aktiva yang timbul karena perusahaan menjual barangnya atau memberikan jasanya kepada para pelanggan dan menerima janji bahwa pelanggan akan memberikan sejumlah uang kepada perusahaan pada suatu waktu dimasa yang akan datang.

Adapun piutang macet yaitu ketika kas masuk menjadi tidak lancar atau tersendat dikarenakan ada alasan-alasan tertentu yang menjadi penyebab terjadinya aliran kas menjadi macet seperti:

- a. Tidak ada manajemen control
- b. Terlalu mudah memberikan kredit
- c. Tidak ada alat pantau yang mengukur kondisi keuangan customer
- d. Terus memberi toleransi kepada customer yang nakal meskipun sudah jelas macet.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Dasar Piutang

1. Pengertian Piutang dan Jenisnya

Piutang adalah jumlah klaim atau tagihan kepada pihak lain dalam bentuk uang, barang atau jasa yang dapat diterima dalam jangka waktu satu tahun atau dalam siklus kegiatan perusahaan.⁴ Tagihan ini bisa dilakukan terhadap individu, perusahaan atau organisasi lainnya. Contoh transaksi-transaksi yang menimbulkan piutang antara lain adalah penjualan barang atau jasa secara kredit, pemberian pinjaman kepada nasabah, atau karyawan, memberi uang muka kepada anak perusahaan, dan lain sebagainya.

Dalam pandangan Islam, piutang secara hukum dapat didasarkan pada adanya perintah dan anjuran agama supaya manusia hidup dengan saling tolong-menolong serta saling bantu-membantu dalam lapangan kebajikan. Dalam Surat Al-Maidah ayat 2 Allah SWT berfirman :

لُعَابٍ شَدِيدٍ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا الْعُدُونَ الْإِثْمَ عَلَى تَعَاوُنُوا وَلَا وَالتَّقْوَى الْبِرَّ عَلَى وَتَعَاوُنُوا



*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan dalam melaksanakan takwa, dan jangan kamu bertolong-tolongan dalam dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaNya”.*⁵

⁴ Hengki Irawan Setia Budi, *Bijak Mengelola piutang Smart In Accounting Receivable*, Jakarta : PT Alex Media Komputindo, 2011, h.3

⁵ Ummul Mu'minin, Al-qur'an Dan Terjemahan Republik Indonesia, Jakarta: Wali, 2010, h.106.

Firman Allah lainnya di dalam Surat al-Baqarah ayat 245 yang artinya :

إِلَيْهِ وَيَبْصُطُ يَقْبِضُ وَاللَّهُ كَثِيرٌ أَضْعَافًا لَهُ فَيُضْعِفُهُ حَسَنًا قَرْضًا اللَّهُ يُقْرِضُ الَّذِي ذَا مَن

تَرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan”.⁶

Piutang dapat dibagi menjadi dua bagian besar berdasarkan terjadinya, yaitu piutang dagang dan piutang nondagang:

- a. Piutang dagang adalah piutang yang timbul dari penjualan secara kredit barang dagangan, barang hasil produksi atau jasa yang dihasilkan.
- b. Piutang nondagang adalah piutang yang timbul dari transaksi yang tidak secara langsung berhubungan dengan penjualan kredit, misalkan piutang kepada karyawan, piutang pendapatan bunga atau piutang kepada pemegang saham.⁷

2. Latar Belakang Terjadinya Utang Piutang

Perjanjian utang piutang dapat terjadi karena dilatarbelakangi sejarah. Pada pokoknya, terjadinya perjanjian utang piutang ada dua

⁶ Ummul Mu'minin, Al-qur'an Dan Terjemahan Republik Indonesia, Jakarta: Wali, 2010 h.39.

⁷ Hengki Irawan Setia Budi, *Bijak Mengelola piutang Smart In Accounting Receivable*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2011, h.3- 4

macam, yaitu karena murni perjanjian utang piutang dan karena dilatarbelakangi perjanjian lain.⁸

a. Karena murni perjanjian utang piutang

Perjanjian utang piutang yang dimaksud disini, tidak ada latar belakang persoalan lain, dan perjanjian itu dibuat hanya semata-mata untuk melakukan utang piutang.

b. Karena dilatarbelakangi perjanjian lain.

Lain halnya dengan perjanjian piutang yang satu ini, terjadinya perjanjian tersebut karena sebelumnya telah terjadi perjanjian lain. Perjanjian sebelumnya dengan perjanjian berikutnya yaitu perjanjian utang piutang kedudukannya berdiri sendiri. Perjanjian sebelumnya telah selesai dilaksanakan.

3. Kredit

a. Definisi

Secara *Ethimologis* istilah kredit berasal dari bahasa Latin, *credere*, yang berarti kepercayaan. Misalkan seorang nasabah debitur yang memperoleh kredit dari bank adalah tentu seseorang yang mendapat kepercayaan dari bank. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi dasar pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur adalah kepercayaan.

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, salah satu pengertian kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur yang diizinkan oleh bank atau badan lain.

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau

⁸Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta : Kencana Pramedia Grup, 2013, h.10.

kesepakatan pinjam meminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁹

b. Unsur-unsur kredit

Dalam kata kredit mengandung berbagai maksud atau dengan kata lain dalam kata kredit terkandung unsur-unsurnya yang direkatkan menjadi satu. Sehingga jika kita berbicara kredit, maka termasuk membicarakan unsur-unsur yang terkandung didalamnya.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut :

- 1) Kepercayaan
- 2) Kesepakatan
- 3) Jangka waktu
- 4) Risiko
- 5) Balas jasa

c. Jenis-jenis kredit

Berdasarkan jangka waktu dan penggunaannya, kredit dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu :

- 1) Kredit investasi, yaitu kredit jangka menengah atau panjang yang diberikan kepada debitur untuk membiayai barang-barang modal dalam rangka rehabilitas, modernisasi, perluasan, ataupun pendirian proyek.
- 2) Kredit modal kerja, yaitu kredit yang diberikan baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk memenuhi modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha dengan jangka waktu maksimal setahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan antara pihak yang bersangkutan.

⁹ Kashmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta : Rajawali Pers, 2012, h.112.

- 3) Kredit konsumsi, yaitu kredit jangka pendek atau panjang yang diberikan kepada debitur untuk membiayai barang-barang kebutuhan atau konsumsi dalam skala kebutuhan rumah tangga yang pelunasannya dari penghasilan bulanan nasabah debitur yang bersangkutan.¹⁰

4. Kolektibilitas Kredit atau Penggolongan Kualitas Kredit

Istilah penggolongan kredit dalam bagian ini adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan penggolongan kredit berdasarkan kolektibilitas kredit yang menggambarkan kualitas kredit tersebut.

Menurut Ketentuan Bank Indonesia, kolektibilitas atau *collectability* adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya. Penggolongan kredit berdasarkan kategori tertentu guna memantau kelancaran pembayaran kembali (angsuran) oleh debitur. Berdasarkan surat keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/Kep/DIR Tanggal 12 November 1998 tentang kualitas aktiva produktif pasal 6 ayat 1, membagi tingkat kolektibilitas kredit menjadi:

- a. Kredit lancar, yaitu kredit yang perjalanannya lancar atau memuaskan, artinya segala kewajiban (bunga atau angsuran utang pokok diselesaikan oleh nasabah secara baik)
- b. Kredit dalam perhatian khusus, yaitu kredit selama 1-2 bulan mutasinya mulai tidak lancar, debitur mulai menunggak
- c. Kredit tidak lancar, yaitu kredit selama 3 atau 6 bulan mutasinya tidak lancar, pembayaran bunga atau utang pokoknya tidak baik
- d. Kredit diragukan, yaitu kredit yang telah tidak lancar dan telah pada jatuh temponya belum dapat juga diselesaikan oleh debitur yang bersangkutan

¹⁰ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2007, h.57.

- e. Kredit macet sebagai kelanjutan dari usaha penyelesaian atau pengaktifan kembali kredit yang tidak lancar dan usaha itu tidak berhasil, barulah kredit tersebut dikategorikan kedalam kredit macet.¹¹

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1 Penggolongan Kolektibilitas

Lama Tunggakan/DPD (Hari)	Kolektibilitas	Keterangan
0	1	Lancar
1-90	2	Dalam Perhatian Khusus
91-120	3	Kurang Lancar
121-180	4	Diragukan
>180	5	Macet

Sumber: Jurnal

Berdasarkan penggolongan kredit diatas maka akan diketahui rasio kreditnya terhadap total kredit yang diberikan atau tingkat pengembalian kreditnya dengan menggunakan rumus:

$$\text{Kredit Lancar} = \frac{\text{Lancar}}{\text{Kredit yang diberikan}} \times 100\%$$

Rumus diatas untuk mengetahui rasio kredit lancar maka total dari seluruh kredit yang tergolong kedalam kategori lancar, sedangkan untuk kategori lainnya juga digunakan rumus yang sama.

5. Faktor-faktor Penyebab Piutang Macet

¹¹Suci Andriani, "Analisis Tingkat Perputaran Piutang Berdasarkan Kolektibilitas Kredit", <http://idr.iain-antasari.ac.id/6180SEMUA%20BAB.pdf>, h.4

Kredit atau piutang macet atau *Non Performing Loan (NPL)*, menjadi salah satu penyakit yang bisa menghambat perkembangan sektor jasa keuangan. Piutang macet disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal.

Faktor intern penyebab timbulnya piutang macet adalah penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur pengkreditan, I'tikad kurang baik dari pemilik, pengurus, atau pegawai bank, lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit serta lemahnya informasi piutang macet. Sedangkan faktor eksternal penyebab timbulnya piutang macet adalah kegagalan usaha debitur, musibah terhadap debitur atau terhadap kegiatan usaha debitur, serta menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit.¹² Selain faktor internal dan eksternal, gejala piutang macet antara lain disebabkan oleh :

a. Menurunnya pendapatan bersih

Turunnya pendapatan bersih dapat disebabkan oleh adanya kenaikan biaya yang tak diimbangi dengan pendapatan yang tinggi.

b. Menurunnya penjualan secara tajam

Penjualan yang menurun adalah hal yang wajar dalam siklus hidup perusahaan, tetapi jika penjualan tersebut mengalami penurunan yang sangat tajam, maka hal ini menandakan bahwa perusahaan akan menemui titik kritis.

c. Menurunnya perputaran persediaan

Perputaran persediaan yang cepat akan memberikan kelancaran bagi perusahaan. Tetapi jika perputaran tersebut kecepatannya menurun berarti banyak barang yang tidak laku, seperti

¹²Veithzal Rivai, dkk, (*Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktik*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012), h.238.

perusahaan diambang kesulitan dalam melakukan pemasaran produknya.

d. Meningkatnya penjualan secara tajam

Naiknya penjualan secara tajam disebabkan perusahaan ingin mempunyai uang secara cepat sehingga perusahaan melakukan penjualan produknya dengan harga jual dibawah harga pokok.

e. Menurunnya perputaran piutang

Lambannya proses pelunasan pelanggan dan sulitnya penagihan akan menimbulkan dampak negatif bagi perusahaan sehingga perusahaan akan mengalami kesulitan dalam melanjutkan kegiatan operasionalnya.

f. Menurunnya modal lancar

Turunnya modal lancar dapat disebabkan oleh pembelian kredit, membengkaknya hutang kepada pihak ketiga atau mungkin disebabkan adanya pemborosan.

g. Nasabah mulai ingkar janji

h. Nasabah membuat laporan fiktif

i. Nasabah tidak terbuka

j. Nasabah menolak wawancara

6. Prosedur Penagihan Piutang

Ada beberapa cara yang dilakukan untuk melakukan penagihan piutang, yaitu sebagai berikut :

a. Melalui surat, teknik ini dilakukan bilamana pembayaran hutang pelanggan dari pelanggan sudah lewat dari beberapa hari dari waktu yang telah ditentukan tetapi belum melakukan pembayaran.

b. Melalui telepon, teknik ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari teknik sebelumnya, yaitu apabila setelah pengiriman surat teguran ternyata tagihan masih belum dibayarkan.

c. Kunjungan personal, yaitu dengan cara melakukan kunjungan secara personal atau pribadi ke tempat pelanggan.

- d. Tindakan-tindakan hukum, teknik ini yang paling akhir dilakukan bila ternyata pelanggan tidak menunjukkan I'tikad yang baik untuk melaksanakan kewajiban membayar hutangnya.

7. Teknik Penyelesaian Piutang Bermasalah

Penyelesaian piutang bermasalah berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. Terhadap debitur yang dipandang masih mempunyai prospek dan debitur masih mempunyai I'tikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya, penyelamatan kredit antara lain dapat dilakukan dengan cara :
 - 1) Penagihan intensif oleh kreditur
 - 2) *Rescheduling*, ialah upaya penyelamatan kredit dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali atau jangka waktu.
 - 3) *Reconditioning*, adalah upaya penyelamatan piutang dengan cara melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat perjanjian kredit, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal atau jangka waktu kredit saja, namun perubahan tersebut tanpa memberikan tambahan kredit.
 - 4) *Restructuring*, adalah upaya penyelamatan dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian piutang berupa pemberian tambahan kredit.
 - 5) *Management Assistancy*, adalah bantuan konsultasi dan manajemen profesional yang diberikan kreditur kepada debitur yang masih mempunyai prospek dan I'tikad baik untuk melunasi kewajibannya, namun lemah di dalam pengelolaan perusahaannya, baik dengan cara menempatkan salah satu petugas kreditur maupun meminta bantuan pihak ketiga (konsultan) sebagai anggota manajemen.

- b. Terhadap debitur yang dipandang kurang mempunyai prospek dan tidak mempunyai I'tikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya, penyelesaian dapat ditempuh melalui cara :
 - 1) Novasi
 - 2) Kompensasi
 - 3) Likuidasi
 - 4) Subrogasi
 - 5) Penebusan jaminan
- c. Terhadap debitur yang sudah tidak mempunyai prospek, namun masih mempunyai i I'tikad baik untuk melunasi kewajibannya dapat diberikan keringanan tunggakan bunga, denda, ongkos-ongkos.
- d. Terhadap debitur yang sudah tidak mempunyai prospek dan tidak mempunyai I'tikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya, penyelesaian kreditnya dapat ditempuh melalui pihak ketiga (Pengadilan Negeri).
- e. Terhadap debitur kredit kecil yang sudah tidak mempunyai prospek dan masih mempunyai prospek, namun tidak memenuhi kewajibannya, penagihan dilakukan oleh kreditur secara intensif.

Adapun analisis NPL (*Non Performing Loan*), dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{NPL: } \frac{\text{KL} + \text{D} + \text{M}}{\text{Kredit yang diberikan}} \times 100\%$$

Untuk penaksiran klasifikasi risiko kredit sebagai berikut :

- a. Risiko rendah (low) bila risiko kredit masih dibawah 5%
- b. Risiko sedang (moderate) bila risiko kredit berada pada 5%-10%

- c. Risiko tinggi (high) bila risiko kredit berada diatas 10%.¹³

Adapun menurut ketentuan Bank Indonesia saat ini adalah maksimal 5% jika melebihi maka akan mempengaruhi penilaian dan tingkat kesehatan bank yang bersangkutan.¹⁴

B. Konsep Pengendalian Intern

1. Pengertian Pengendalian Intern

Sebelumnya istilah yang dipakai untuk pengendalian intern adalah sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern dan struktur pengendalian intern. Mulai tahun 2001 istilah resmi yang digunakan IAI adalah pengendalian intern. Pengendalian intern merupakan kegiatan yang sangat penting dalam pencapaian tujuan perusahaan. Demikian pula dunia usaha mempunyai perhatian yang makin meningkat terhadap pengendalian intern. Adapun defenisi pengendalian intern yaitu sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh aktivitas dewan komisaris, manajemen atau pegawai lainnya yang didesain untuk memberikan keyakinan yang wajar tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini :

- a. Keandalan pelaporan keuangan
- b. Efektivitas dan efisiensi operasi
- c. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.¹⁵

COSO (*Committee of Sponsoring Organization*) mendefinisikan pengendalian intern sebagai berikut : *“Internal control is a process, affected by an entity’s board of directors, management, and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the*

¹³Hendra Salazaar, “Makalah Manajemen Risiko” diambil dari: <http://hendrasalazaar.blogspot.co.id/2016/03/makalah-manajemen-risiko-risiko.html>.(27 Agustus 2018 Pukul 20:52 WIB)

¹⁴Istiningsih, “Analisis Kolektibilitas Kredit Pada PD. BPR BKK Purworejo Cabang Bayan”h.14.

¹⁵Sawyers , (*Internal Auditing Buku Satu Edisi Kelima*, Salemba Empat, Jakarta, 2005), h.58.

achievement of objectives relating to operations, reporting, and compliance”.

Pengertian pengendalian intern menurut COSO tersebut, dapat dipahami bahwa pengendalian intern adalah proses, karena hal tersebut menembus kegiatan operasional organisasi dan merupakan bagian integral dari kegiatan manajemen dasar.

Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak bagi manajemen, bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarannya. Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan kehandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Sistem pengendalian intern pada hakikatnya adalah suatu mekanisme yang didesain untuk menjaga (*preventif*), mendeteksi (*detektif*), dan memberikan mekanisme pembetulan (*korektif*) terhadap potensi terjadinya kesalahan (kekeliruan, kelalaian, *error*) maupun penyalahgunaan (kecurangan, *fraud*).¹⁶

Pengendalian intern dapat dibedakan dalam berbagai sudut pandang, yaitu:

- a. *Preventif controls*, yaitu pengendalian intern yang dirancang dengan maksud untuk mengurangi kemungkinan terjadi kesalahan dan penyalahgunaan. Contoh jenis pengendalian intern ini ialah desain formulir yang baik, itemnya lengkap, mudah diisi, serta *user training* atau pelatihan kepada orang-orang yang berkaitan dengan input sistem, sehingga mereka tidak melakukan kesalahan.
- b. *Detection control*, adalah pengendalian yang didesain dengan tujuan agar apabila data direkam/dikonversi dari media sumber untuk ditransfer ke sistem computer dideteksi bila terjadi

¹⁶Sukrisno Agoes, (*Auditing, Edisi keempat Buku 1*, Salemba Empat, Jakarta, 2012), h. 102.

kesalahan (maksudnya tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan). Contoh jenis pengendalian ini adalah misalnya jika seseorang mengambil uang di ATM, maka seharusnya program computer deteksi jika dana tidak cukup, atau saldo minimum tidak mencukupi, atau melebihi jumlah maksimal yang diijinkan untuk pengambilan tiap harinya.

- c. *Corrective control*, adalah pengendalian yang sifatnya jika terdapat data yang sebenarnya *error* tetapi tidak terdeteksi oleh *detection control*, atau data yang *error* yang terdeteksi oleh program validasi, harus ada prosedur yang jelas tentang bagaimana melakukan pembetulan terhadap data yang salah dengan maksud untuk mengurangi kemungkinan kerugian kalau kesalahan/penyalahgunaan tersebut sudah benar-benar terjadi.¹⁷

2. Prinsip Dasar Pengendalian Intern

Ada empat konsep dasar yang mendasari telaah atas struktur pengendalian intern dan penetapan risiko pengendalian, diantaranya tanggung jawab manajemen, kepastian yang wajar, keterbatasan yang melekat (*inhern*), dan metode pengendalian data.

- a. Tanggung jawab manajemen

Manajemen, dan bukan auditor yang harus menyusun dan memonitor struktur pengendalian internnya. Konsep ini sesuai dengan ketentuan yang menyatakan bahwa manajemen, dan bukan auditor yang bertanggung jawab dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

- b. Kepastian yang wajar

Suatu perusahaan harus mengusahakan struktur pengendalian intern yang memberikan kepastian yang wajar tetapi bukan

¹⁷Raymond Mc Leod, George P. Schell, (*Sistem Informasi Manajemen*, Terjemahan Ali Akbar dan Afia Fitriani, Salemba Empat, Surabaya, 2008), h. 67

mutlak, bahwa laporan keuangannya telah disajikan dengan wajar. Struktur pengendalian intern disusun oleh manajemen setelah mempertimbangkan baik biaya maupun manfaat pengendalian tersebut. Seringkali, manajemen enggan untuk menerapkan sistem pengendalian yang ideal karena biayanya mungkin terlalu tinggi. Sebagai contoh, auditor tidak selayaknya mengharapkan manajemen dari perusahaan kecil untuk mempekerjakan beberapa personil tambahan pada bagian akuntansi bila hanya untuk perbaikan kecil saja pada penyediaan data akuntansi yang lebih terhandalkan. Adakalanya, jauh lebih murah jika auditor menyelenggarakan pemeriksaan yang lebih luas daripada harus mengeluarkan biaya pengendalian intern yang tinggi.

c. Keterbatasan yang melekat (*inherent*)

Struktur pengendalian intern tidak dapat dianggap sepenuhnya efektif, meskipun telah dirancang dan disusun dengan sebaik-baiknya. Bahkan, meskipun sistem yang ideal telah dirancang, keberhasilannya tetap bergantung pada kompetensi dan kehandalan oleh pelaksananya. Sebagai contoh, misalkan prosedur perhitungan persediaan telah disusun dengan seksama dan dibutuhkan dua orang karyawan yang harus menghitung secara terpisah. Apabila kedua karyawan yang bertugas tidak memahami petunjuk-petunjuk yang mereka terima, atau keduanya bekerja ceroboh, perhitungan persediaan itupun cenderung tidak benar. Bahkan apabila hasil perhitungan itu benar, manajemen mungkin mengabaikan prosedurnya dan memerintahkan karyawannya untuk menaikkan jumlah perhitungan barang-barang yang telah dibuat, untuk menaikkan laba yang dilaporkan. Sama halnya bila karyawan yang bersangkutan, mungkin dengan sengaja menaikkan jumlah perhitungannya untuk menutupi pencurian barang-barang tersebut oleh salah seorang atau keduanya. Inilah yang disebut persekongkolan (*collusion*). Karena keterbatasan yang melekat

pada struktur pengendalian tersebut dan arena auditor tidak dapat mengharapkan kepastian yang wajar dari keefektifannya, maka kepercayaan tidak dapat sepenuhnya diletakkan pada beberapa tingkat risiko pengendalian. Karena itu, untuk merancang sistem pengendalian intern yang efektif, auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dalam menguji pengendalian intern. Selalu ada kemungkinan bahwa sistem pengendalian tidak dapat melacak seluruh kesalahan yang material.

d. Metode pengolahan data

Konsep pengendalian intern berlaku sama dengan sistem maupun manual komputerisasi (EDP). Terdapat perbedaan besar antara sistem manual yang sederhana bagi sebuah perusahaan kecil dan sistem EDP yang sangat rumit untuk perusahaan industri bertaraf internasional. Meskipun demikian, tujuan pengendalian intern adalah sama.¹⁸

3. Tujuan Pengendalian Intern

Tujuan pengendalian intern menurut pendapat para ahli dapat dijelaskan bahwa tujuan pengendalian intern yaitu mencakup tiga hal pokok yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Tujuan-tujuan operasi yang berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasi. Bahwa pengendalian intern dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari semua operasi perusahaan sehingga dapat mengendalikan biaya yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi.
- b. Tujuan-tujuan pelaporan. Bahwa pengendalian intern dimaksudkan untuk meningkatkan keandalan data serta catatan-catatan akuntansi dalam bentuk laporan keuangan dan laporan

¹⁸Alvin A. Arens, (*Auditing Suatu Pendekatan Terpadu*, Cetakan Keenam, Buku Satu, Terjemahan Ilham Tjakra Kusuma, Erlangga, Jakarta, 2001), h. 290.

manajemen sehingga tidak menyesatkan pemakai laporan tersebut dan dapat diuji kebenarannya.

- c. Tujuan-tujuan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Bahwa pengendalian intern dimaksudkan untuk meningkatkan ketaatan entitas terhadap hukum-hukum dan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, pembuat aturan terkait, maupun kebijakan-kebijakan entitas itu sendiri.¹⁹

Tujuan pertama dirancangnya pengendalian intern dari segi pandang manajemen ialah untuk dapat diperolehnya data yang dapat dipercaya, yaitu data yang lengkap, akurat, unik, *reasonable*, dan kesalahan-kesalahan data di deteksi. Tujuan berikutnya adalah dipatuhinya kebijakan akuntansi, yang akan dicapai jika data diolah tepat waktu, penilaian, klasifikasi dan pisah batas waktu akuntansi tepat. Tujuan selanjutnya ialah pengamanan asset, yaitu dengan adanya *otorisasi*, *distribusi output*, data valid dan diolah serta disimpan secara aman.

Suatu pengendalian intern yang baik dalam perusahaan akan memberikan keuntungan yang sangat berarti bagi perusahaan itu sendiri, karena :

- a. Dapat memperkecil kesalahan-kesalahan dalam penyajian data akuntansi, sehingga akan menghasilkan laporan yang benar.
- b. Melindungi atau membatasi kemungkinan terjadinya kecurangan dan penggelapan-penggelapan.
- c. Kegiatan organisasi akan dapat dilaksanakan dengan efisien.
- d. Mendorong dipatuhinya kebijakan pimpinan.
- e. Tidak memerlukan detail audit dalam bentuk pengujian *substantif* atas bahan bukti/data perusahaan yang cukup besar oleh akuntan public.

¹⁹Dewi Wahyuni, (*Pengendalian Internal COSO*, Diakses dari Wahyunidewi77.blogspot.com, Tanggal 6 April 2018), Pukul 20.22 WIB.

4. Keterbatasan Pengendalian Intern

Perlu diingat bahwa sistem pengendalian intern yang terbaik bukan struktur pengendalian yang seketat mungkin secara maksimal, sistem pengendalian intern juga mempunyai keterbatasan-keterbatasan. Keterbatasan atau kelemahan yang melekat pada sistem pengendalian intern antara lain :

a. Kesalahan dalam pertimbangan

Kadang-kadang, manajemen dan personel lainnya dapat melakukan pertimbangan yang buruk dalam membuat keputusan bisnis atau dalam melaksanakan tugas rutin karena prosedur lainnya.

b. Kemacetan

Kemacetan dalam melaksanakan pengendalian dapat terjadi karena personel salah memahami instruksi atau membuat kekeliruan akibat kecerobohan, kebingungan, atau kelelahan. Perubahan sementara atau permanen dalam personel atau dalam sistem atau prosedur juga dapat berkontribusi pada terjadinya kemacetan.

c. Kolusi

Individu yang bertindak bersama, seperti karyawan yang melaksanakan suatu pengendalian penting bertindak bersama dengan karyawan lain, konsumen atau pemasok, dapat melakukan sekaligus menutupi kecurangan sehingga tidak dapat dideteksi oleh pengendalian intern (misalnya, kolusi antara tiga karyawan mulai dari departemen personel, manufaktur, dan penggajian untuk membuat pembayaran kepada karyawan fiktif, atau skedul pembayaran kembali antara seorang karyawan dalam departemen pembelian dan pemasok atau antara seorang karyawan di departemen penjualan dengan pelanggan).

d. Penolakan manajemen

Manajemen dapat mengesampingkan kebijakan atau prosedur tertulis untuk tujuan tidak sah seperti keuntungan pribadi atau

presentasi mengenai kondisi keuangan suatu entitas yang dinaikkan atau status ketaatan (misalnya, menaikkan laba yang dilaporkan untuk menaikkan pembayaran bonus atau nilai pasar dari saham entitas, atau menyembunyikan pelanggaran dari perjanjian hutang atau ketidaktaatan terhadap hukum dan peraturan). Praktik penolakkan (*override*) termasuk membuat penyajian salah dengan sengaja kepada auditor dan lainnya seperti menerbitkan dokumen palsu untuk mendukung pencatatan transaksi penjualan fiktif.

e. Biaya versus manfaat

Biaya pengendalian intern suatu entitas seharusnya tidak melebihi manfaat yang diharapkan untuk diperoleh. Karena pengukuran yang tepat baik dari biaya dan manfaat biasanya tidak memungkinkan, manajemen harus membuat baik estimasi kuantitatif maupun kualitatif dalam mengevaluasi hubungan antara biaya dan manfaat.²⁰

Selain itu, faktor manusia adalah faktor yang penting sekali dalam setiap pelaksanaan sistem pengendalian intern. Sebuah sistem pengendalian intern yang baik akan dapat menjadi tidak efektif oleh karena adanya karyawan yang kelelahan, ceroboh, atau bersikap acuh tak acuh. Demikian juga halnya dengan kolusi, dimana kolusi ini akan dapat secara signifikan mengurangi keefektifan sebuah sistem dan mengeliminasi proteksi yang ditawarkan dari pemisahan tugas. Belum lagi adanya sebuah pandangan umum yang mengatakan bahwa pada prinsipnya di dunia ini tidak ada sesuatu yang sempurna, termasuk sistem pengendalian intern yang dijalankan perusahaan.²¹

5. Konsep Pengendalian Intern Piutang Usaha

²⁰William C. Boynton, dkk, (*Modern Auditing*, Terjemahan Gina Gania dan Ichsan SetiyoBudi, Erlangga, Jakarta, 2003), h.376.

²¹Hery, (*Auditing 1 Dasar-dasar Pemeriksaan Akuntansi*, Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta, 2011), h. 103.

Pengendalian intern menurut COSO terdiri atas lima komponen yang saling terkait berikut ini:

a. Lingkungan Pengendalian

Menetapkan corak suatu organisasi, memengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern yang lain, menyediakan disiplin dan struktur. Lingkungan pengendalian mencakup hal-hal berikut ini :

- 1) Integritas dan nilai etika
- 2) Komitmen terhadap kompetensi
- 3) Partisipasi dewan komisaris atau komite audit
- 4) Struktur organisasi
- 5) Pemberian wewenang dan tanggung jawab
- 6) Kebijakan dan praktik sumber daya manusia

b. Penaksiran Risiko

Penentuan risiko merupakan hal yang penting bagi manajemen. Risiko yang relevan dengan pelaporan keuangan mencakup peristiwa dan keadaan intern maupun ekstern yang dapat terjadi dan secara negatif memenuhi kemampuan entitas untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan data keuangan konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan. Risiko dapat timbul atau berubah karena keadaan berikut ini :

- 1) Perubahan dalam lingkungan operasi
- 2) Personel baru
- 3) Sistem informasi yang baru atau yang diperbaiki
- 4) Teknologi baru
- 5) Lini produk, produk, atau aktivitas baru
- 6) Restrukturisasi korporasi
- 7) Operasi luar negeri

8) Standar akuntansi baru

Risiko kredit adalah risiko tidak terbayarnya kredit yang telah diberikan kepada para pelanggan. Sebelum perusahaan memutuskan untuk menyetujui permintaan atau penambahan kredit oleh para pelanggan, perlulah mengadakan evaluasi risiko kredit dari para pelanggan tersebut. Menilai risiko kredit, *credit manager* harus mempertimbangkan berbagai faktor yang menentukan besar kecilnya kredit tersebut. Pada umumnya bank atau perusahaan dalam mengadakan penilaian risiko kredit terhadap debitur adalah dengan memerhatikan lima “C”. lima “C” tersebut adalah *character, capacity, collateral, capital, dan conditions*.

Character, menunjukkan kemungkinan atau profitabilitas dari pelanggan untuk secara jujur memenuhi kewajibannya. Faktor ini sangat penting, karena setiap transaksi kredit mengandung kesanggupan untuk membayar. *Capacity*, adalah pendapat subyek mengenai kemampuan dari pelanggan, ini diukur dengan *record* diwaktu lalu, disertai dengan observasi fisik (*survey*) pada rumah dan kantor maupun usaha dari calon debitur. *Capital*, diukur oleh posisi *financial* pelanggan secara umum, dimana hal ini ditunjukkan oleh analisa *ratio financial*, yang khususnya ditekankan “*tangible net worth*” dari perusahaan. *Collateral*, dicerminkan oleh aktiva dari langganan yang dikaitkan, atau dijadikan jaminan bagi keamanan kredit yang diberikan kepada pelanggan tersebut. *Condition*, menunjukkan pengaruh langsung dari *trend* ekonomi pada umumnya terhadap perusahaan yang bersangkutan atau perkembangan khusus dalam suatu bidang ekonomi tertentu yang mungkin mempunyai efek terhadap kemampuan pelanggan untuk memenuhi kewajibannya.

Setelah diuraikan beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam penilaian risiko kredit, maka selanjutnya perlu bagi perusahaan untuk mengambil langkah-langkah tertentu di dalam

usaha untuk memperkecil risiko tidak terbayarnya piutang dengan mengadakan penyaringan atau seleksi terhadap para pelanggan atau debitur.

- 1) Dibentuknya unit kerja atau seleksi yang khusus ditugaskan mengurus piutang. Tugas pokok dari unit kerja ini meliputi kegiatan dibawah ini :
 - a) Mencari langganan potensial yang dapat diberikan kredit
 - b) Menyeleksi calon debitur
 - c) Membukukan transaksi kredit yang terjadi
 - d) Melakukan penagihan piutang
 - e) Membukukan transaksi kredit/piutang
 - f) Menyusun dan mengklarifikasi piutang *overdue* berdasarkan umurnya masing-masing
 - g) Membuat analisa dan evaluasi piutang sebagai salah satu bentuk investasi
 - h) Menyusun dan memperkirakan arus kas masuk dari piutang
 - i) Membuat laporan tentang pengelolaan piutang bagi para pengambil kebijakan tentang piutang.
- 2) Digariskan kebijakan piutang yang jelas untuk dapat digunakan sebagai pedoman bagi unit kerja yang mengurus piutang. Kebijakan ini meliputi dibawah ini :
 - a) Penentuan plafon kredit untuk berbagai jenis atau tingkatan debitur
 - b) Penentuan jangka waktu kredit
 - c) Pedoman melakukan seleksi calon debitur berdasarkan lima “C”
 - d) Penentuan jumlah piutang ragu-ragu maksimal yang dapat dibenarkan sebagai dasar penentuan besarnya cadangan piutang ragu-ragu
 - e) Penentuan jumlah anggaran yang digunakan untuk mengadministrasi piutang

- 3) Penentuan kriteria untuk mengukur efisiensi pengelolaan piutang. Berbagai kriteria yang dapat digunakan sebagai indikator pengelolaan piutang :
 - a) Tingkat perputaran piutang
 - b) Persentase piutang tak tertagih yang sebenarnya.
- 4) Usia piutang rata-rata. Daftar piutang yang ada dikelompokkan berapa persen dari piutang masih dalam batas waktu piutang yang seharusnya, berapa persen satu bulan terlambat/dua bulan terlambat/tiga bulan terlambat dan sebagainya. Cara ini dapat diperkirakan berapa dari piutang *outstanding* sebenarnya masih memiliki nilai ekonomis sebagai kekayaan dan berapayang seharusnya perlu diragukan atau bahkan perlu dihapuskan. Kemudian dapat dipisah kelompok debitur yang masih bonafit, kelompok yang perlu memperoleh perhatian yang lebih seksama, kelompok yang memerlukan penanganan secara khusus, dan kelompok yang seharusnya dihapuskan dari daftar debitur.
- 5) Piutang sebagai salah satu bentuk investasi menimbulkan biaya berupa :
 - a) Biaya modal
 - b) Biaya administrasi piutang
 - c) Biaya yang berupa piutang tak tertagih

c. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Aktivitas tersebut membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk menanggulangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas, sudah dilaksanakan. Aktivitas pengendalian mempunyai berbagai tujuan dan diterapkan di berbagai tingkat organisasi dan

fungsi. Umumnya aktivitas pengendalian yang mungkin relevan dengan audit dapat digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan hal-hal berikut ini :

- 1) Review terhadap kinerja
- 2) Pengolahan informasi
- 3) Pengendalian pihak
- 4) Pemisahan tugas

Prosedur pemisahan tugas dalam rangka memenuhi aktivitas pengendalian harus memenuhi syarat antara lain :

- 1) Harus dipisahkan fungsi-fungsi operasional dan penyimpanan dari fungsi akuntansi. Fungsi operasi adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk melaksanakan suatu kegiatan. Setiap kegiatan dalam perusahaan memerlukan otorisasi dari manajer. Fungsi yang memiliki wewenang untuk menyimpan aktiva perusahaan. Fungsi akuntansi adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk mencatat peristiwa keuangan perusahaan.
- 2) Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggungjawab penuh untuk melakukan semua tahap suatu transaksi. Untuk melaksanakan transaksi yang berhubungan dengan piutang usaha misalnya, fungsi-fungsi yang dibentuk adalah fungsi akuntansi, fungsi penerimaan, fungsi penjualan, dan sebagainya.²²

Tujuan pokok pemisahan fungsi ini adalah untuk mencegah dan untuk mendeteksi kesalahan dan kecurangan dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada seseorang. Transaksi yang terjadi dalam suatu organisasi harus diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi.

²²Mulyadi, (*Auditing*, Cetakan Pertama , Buku Satu, Edisi Keenam, Salemba Empat, Jakarta, 2006), h.156.

Formulir merupakan media yang digunakan untuk merekam penggunaan wewenang untuk memberikan otorisasi terlaksananya transaksi dalam organisasi. Oleh karena itu, penggunaan formulir harus diawasi sedemikian rupa guna mengawasi pelaksanaan otorisasi. Di lain pihak, formulir merupakan dokumen yang digunakan sebagai dasar untuk pencatatan transaksi dalam catatan akuntansi. Prosedur pencatatan yang baik akan menjamin data yang direkam dalam formulir dicatat akuntansi dengan tingkat ketelitian dan kehandalan yang tinggi. Dengan demikian, sistem otorisasi, akan menjamin dihasilkannya dokumen pembukuan yang dapat dipercaya bagi proses akuntansi.

Dokumen dan catatan akuntansi yang digunakan sebagai dasar pencatatan kedalam kartu piutang adalah faktur penjualan, bukti kas masuk, memo kredit dan bukti memorial.

d. Informasi dan Komunikasi

Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, yang meliputi sistem akuntansi, terdiri atas metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi entitas (baik peristiwa maupun kondisi) dan untuk memelihara akuntabilitas bagi asset, utang dan ekuitas yang bersangkutan. Kualitas informasi yang dihasilkan dari sistem tersebut berdampak terhadap kemampuan manajemen untuk membuat keputusan semestinya dalam mengendalikan aktivitas entitas dan menyiapkan laporan keuangan yang andal.

Komunikasi mencakup penyediaan suatu pemahaman tentang peran dan tanggung jawab individual berkaitan dengan pengendalian intern terhadap pelaporan keuangan.

Auditor harus memperoleh pengetahuan memadai tentang sistem informasi yang relevan dengan pelaporan keuangan untuk memahami :

- 1) Golongan transaksi dalam operasi entitas yang signifikan bagi laporan keuangan.
- 2) Bagaimana transaksi tersebut dimulai.
- 3) Catatan akuntansi, informasi pendukung, dan akun tertentu dalam laporan keuangan yang tercakup dalam pengolahan dan pelaporan transaksi.
- 4) Pengolahan akuntansi yang dicakup sejak saat transaksi dimulai sampai dengan dimasukkan kedalam laporan keuangan, termasuk alat elektronik (seperti komputer dan *electronic data interchange*) yang digunakan untuk mengirim, memproses, memelihara, dan mengakses informasi

e. Pemantauan dan pengawasan

Pemantauan adalah proses penentuan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pengawasan atau pemantauan merupakan evaluasi rasional yang dinamis atas informasi yang diberikan pada informasi komunikasi untuk tujuan manajemen pengendalian. Pemantauan ini mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Pengawasan merupakan proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi dalam piutang yaitu :

- 1) Volume penjualan kredit
- 2) Syarat pembayaran penjualan kredit
- 3) Ketentuan tentang pembatasan kredit
- 4) Kebijakan dalam mengumpulkan piutang

5) Kebiasaan membayar dari para langganan.²³

C. Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan proposal ini. Disajikan dalam tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian		Hasil
				Persamaan	Perbedaan	
1	Dian Hartati (2009)	Analisis Pengendalian Intern Piutang Usaha pada PT. SFI Medan	Termasuk penelitian kualitatif deskriptif yang menggunakan pendekatan studi kasus	Keduanya sama-sama membahas tentang pengendalian intern.	Pada penelitian terdahulu ini hanya membahas pengendalian intern piutang usaha sedangkan penelitian ini membahas tentang pengendalian intern piutang dalam mengelola piutang	Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis terhadap prosedur kerja, mulai dari mendapatkan calon debitur sampai pelunasan piutang usaha pada PT. SFI Medan diketahui bahwa manajemen

²³Bambang Riyanto, (*Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*, Edisi Keempat, Salemba Empat, Jakarta, 2007), h.85

					macet	perusahaan memberikan perhatian yang baik.
2	Herlina Vanessa Vitaradiaz (2013)	Analisis Sistem Pengendalian Intern Penjualan Kredit pada KPRI Universitas Brawijaya Malang	Termasuk penelitian kualitatif deskriptif yang menggunakan pendekatan studi kasus	Keduanya sama-sama membahas tentang pengendalian intern	Pada penelitian terdahulu ini membahas tentang pengendalian intern penjualan kredit sedangkan penelitian ini membahas tentang pengendalian intern piutang dalam mengelola piutang macet	Pada dasarnya untuk penerapan sistem pengendalian intern penjualan kredit di KPRI-UB sudah cukup baik, namun ada celah yang menjadi kendala dalam sistem ini antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - Mudah nya KPRI-UB memberikan otorisasi dalam penjualan kredit

						<p>dimana penjual an kredit akan terus dilakuk an selama piutang anggota belum melebi hi batas flafod pinjam an.</p> <p>- Lama angsuran n pembay aran piutang yang ditentu kan sendiri oleh anggota dengan kebijak</p>
--	--	--	--	--	--	--

						an pember ian batasan maksim al 10x angsuran untuk bahan kebutu han pokok.
3	Sulaeman (2012)	Analisis Prosedur Pengendalian Intern Piutang Usaha pada Astra Credit Companies Cabang Makasar	Termasuk penelitian kualitatif deskriptif yang menggunakan pendekatan studi kasus	Keduanya sama-sama membahas tentang pengendalian intern piutang	Pada penelitian terdahulu ini membahas tentang prosedur pengendalian intern piutang usaha sedangkan penelitian ini membahas tentang pengendalian intern piutang dalam mengelola piutang	Secara keseluruhan, prosedur pengendalian intern terhadap piutang usaha pada Astra Credit Companies Cabang Makasar berjalan cukup efektif, dimana manajemen perusahaan sudah menerapkan konsep dasar

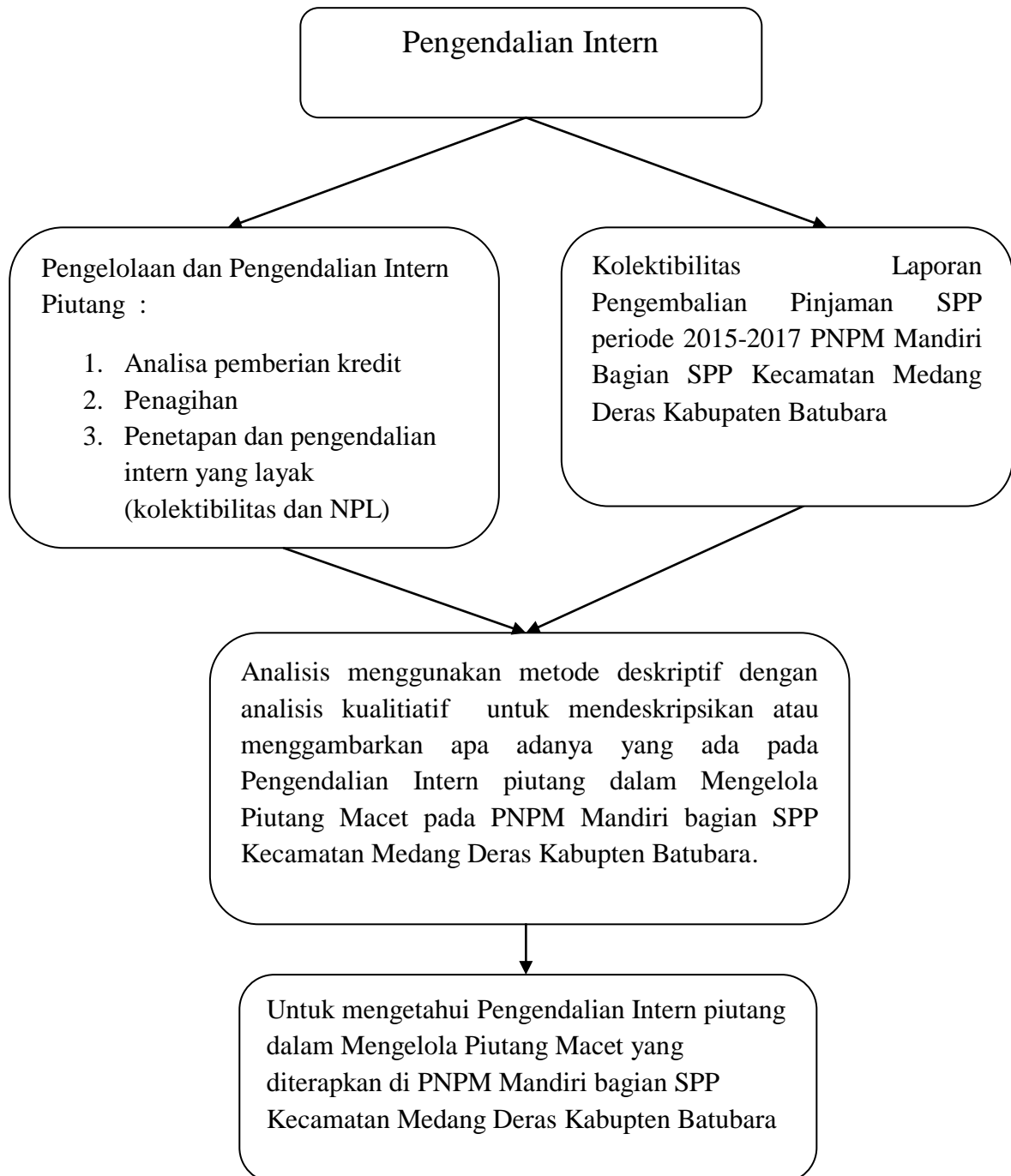
					macet.	dan prinsip-prinsip pengendalian intern, namun disisi lain terdapat beberapa prosedur yang belum mencerminkan konsep pengendalian intern seperti masih diperbolehkannya <i>A/R admin</i> menerima uang hasil tagihan dari <i>ARHO</i> yang dilibatkannya <i>sales officier</i> dan <i>surveyor</i> dalam melakukan penagihan terhadap <i>customer</i> yang menunggak angsuran pertama
--	--	--	--	--	--------	---

						sampai keenam.
--	--	--	--	--	--	-------------------

D. Flow Chart Penelitian

Kerangka teoritis merupakan gambar pengaruh antar variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini yaitu Sistem Pengendalian Intern Piutang Dalam Mengelola Piutang Macet di PNPM Mandiri bagian SPP Kecamatan Medang Deras Kabupten Batubara.

Maka, kerangka teoritis dalam penelitian ini dikemukakan sebagai berikut:



Dari flowchart diatas dapat diketahui bahwasanya judul penelitian adalah Pengendalian Intern Piutang dalam Mengelola Piutang Macet pada PNPM Mandiri bagian SPP Kecamatan Medang Deras Kabupten Batubara, dengan menganalisis kolektibilitas laporan pengembalian pinjaman SPP Periode 2015-2017 untuk mengetahui apakah pengelolaan dan pengendalian intern piutang pada PNPM Mandiri bagian SPP di Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara sudah layak atau belum memenuhi standar yang berlaku. Kemudian penelitian ini menggunakan metode Deskriptif dengan analisis Kualitatif untuk mendeskripsikan atau menggambarkan apa adanya yang ada pada Pengendalian Intern piutang dalam Mengelola Piutang Macet pada PNPM Mandiri bagian SPP Kecamatan Medang Deras Kabupten Batubara.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah desain penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subyek atau obyek penelitian.²⁴ Dengan kata lain penelitian deskriptif menjabarkan suatu permasalahan dan bukan bertujuan untuk membuktikan suatu teori. Karena merupakan sebuah penjabaran atas suatu permasalahan, penelitian ini dilakukan atas dasar sebuah permasalahan yang timbul akibat sebuah kebijakan atau tindakan akan hal tertentu. Istilah penelitian kualitatif menurut Kirk dan Miller pada awalnya bersumber pada pengamatan kualitatif yang dipertentangkan dengan pengamatan kuantitatif lalu, didefinisikan bahwa metodologi kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kekhasannya sendiri.²⁵ Alasan peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif karena tujuannya untuk mendeskripsikan atau menggambarkan apa adanya yang ada pada pengendalian intern piutang dalam mengelola piutang macet pada PNPM Mandiri bagian SPP Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara.

Jenis metode deskriptif yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus (*case study*), dimana penelitian ini dilakukan dengan menganalisa dan mendeskripsikan data berupa laporan keuangan berupa piutang macet 3 (Tiga tahun terakhir) dan hasil wawancara dengan pihak PNPM Mandiri bagian SPP Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara.

²⁴A. Sanusi, (*Metodologi Penelitian Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta, 2013), h.13

²⁵Azhari Akmal Tarigan, dkk. *Metodologi Penelitian Islam* (Medan: La-Tansa Press, 2011) h.19

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di PNPM Mandiri bagian SPP Kecamatan Medang Deras Kabupten Batubara Kelurahan Pangkalan Dodek Baru.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2018 pada pukul 11.00 WIB.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian

Yang dimaksud dengan subjek dalam penelitian ini adalah orang, benda, tempat atau benda yang diamati dalam rangka pembubutan sebagai sasaran. Adapun pada penelitian ini subjeknya adalah Pengendalian Intern Piutang Dalam Mengelola Piutang Macet.

2. Objek Penelitian

Yang dimaksud objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran. Adapun pada penelitian ini objeknya adalah kolektibilitas laporan pengembalian pinjaman SPP Periode 2015-2017

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data atau informasi yang berhubungan langsung dengan penelitian dimana data ini diperoleh dengan cara melakukan dokumentasi. Data-data tersebut berupa data hasil wawancara dan atau observasi langsung dengan PNPM Mandiri bagian SPP Kecamatan Medang Deras Kabupten Batubara. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber lain yang dikategorikan sebagai data sekunder misalnya melalui catatan atau arsip perusahaan dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain.²⁶

²⁶W. Purhantara, (*Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010), h.79

Berbagai sumber tertulis yang memungkinkan dapat dimanfaatkan dalam penelitian ini akan digunakan semaksimal mungkin untuk keberhasilan penelitian seperti buku-buku, jurnal ilmiah, arsip, dokumen pribadi, dokumen resmi lembaga-lembaga yang terkait dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diperlukan pada penelitian kualitatif ini, menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Teknik observasi peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan langsung secara sistematis terhadap fenomena yang diselidiki. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap piutang macet yang ada pada PNPM Mandiri bagian SPP (Simpan Pinjam Perempuan) di Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara. Metode ini merupakan metode pengumpulan data, mencatat informasi yang disaksikan selama penelitian dan mencatat hal-hal yang diperlukan berkaitan dengan data yang diteliti.

2. Wawancara

Teknik melalui wawancara adalah teknik memperoleh informasi secara langsung melalui permintaan keterangan-keterangan kepada pihak pertama yang dipandang dapat memberikan keterangan dan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan yaitu dengan mengadakan pembicaraan langsung dengan karyawan yang bertugas dalam pengendalian intern piutang dalam mengelola piutang macet pada PNPM Mandiri bagian SPP Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara. Wawancara ini dilakukan kepada bagian Bendahara dan Sekretaris PNPM Mandiri Bagian SPP.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui dokumentasi, diperlukan alat atau instrument yang memandu untuk pengambilan data-data dokumen. Data dokumen dapat berupa foto, gambar, peta, grafik, struktur organisasi, catatan bersejarah, dan sebagainya. Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data laporan keuangan piutang macet lembaga/organisasi yang terkait dengan sistem pengendalian intern piutang yang ada pada PNPM Mandiri bagian SPP Kecamatan Medang Deras Kabupten Batubara.

F. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisa deskriptif kualitatif, yaitu analisa data yang pengujiannya dalam bentuk keterangan dan pembahasan teoritis yang bertujuan menganalisa hal-hal yang dapat dianalisa bukan dengan angka-angka tetapi dengan teori-teori yang dibuktikan dengan kenyataan yang terjadi²⁷, dalam hal ini akan dianalisa adalah mengenai Pengendalian Intern Piutang dalam Mengelola Piutang Macet pada PNPM Mandiri bagian SPP Kecamatan Medang Deras Kabupten Batubara.

Adapun metode kualitatif analisis data dengan pendekatan deskriptif terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

1. Reduksi Data

Yakni merangkum, memilih hal-hal yang pokok. Memfokuskan pada hal-hal yang penting pada penelitian yang hanya masalah yang terkait pada Pengendalian Intern Piutang dalam Mengelola Piutang Macet pada PNPM Mandiri bagian SPP Kecamatan Medang Deras Kabupten Batubara periode 2015-2017

²⁷Dr. Sugiono, (*Metode Pengendalian Bisnis Cetakan ke-16*, Alfabeta, Bandung, 2012), h.426.

2. Penyajian Data

Adalah pengumpulan informasi yang terkait atas Pengendalian Intern Piutang dalam Mengelola Piutang Macet pada PNPM Mandiri bagian SPP Kecamatan Medang Deras Kabupten Batubara tahun 2015-2017 yang kemudian nantinya akan memberikan kesimpulan atas penelitian yang diteliti tersebut.

3. Verifikasi/Kesimpulan

Verifikasi/kesimpulan adalah tahap terakhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini penulis mengutarakan kesimpulan dari data-data yang diperoleh, atas judul penelitian yakni Pengendalian Intern Piutang dalam Mengelola Piutang Macet pada PNPM Mandiri bagian SPP Kecamatan Medang Deras Kabupten Batubara.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sekilas Mengenai Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Unit Pengelola Kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan yang berada di Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara Sumatera Utara, Indonesia. Kecamatan Medang Deras memiliki letak wilayah yaitu 3.0.20"1 – 3.0.24"20 lintang utara dan 99.0.18"36 – 99.0.19"4 bujur timur. Kecamatan Medang Deras terdiri dari 18 Desa yaitu :

- 1) Pematang Cengkering
- 2) Pakam
- 3) Mandarsah
- 4) Tanjung Sigoni
- 5) Durian
- 6) Nenasiam
- 7) Pangkalan Dodek Baru
- 8) Pagurawan
- 9) Sidomulyo
- 10) Lalang
- 11) Pangkalan Dodek
- 12) Medang
- 13) Medang Baru
- 14) Sei Buah Keras
- 15) Sei Rakyat
- 16) Sei Raja
- 17) Pakam Raya
- 18) Aek Nauli

2. Profil Singkat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri

PNPM Mandiri Pedesaan adalah program yang dirancang pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. PNPM Mandiri Pedesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PKK) yang telah dilaksanakan sejak 1998. Lalu, PNPM Mandiri sendiri dikukuhkan secara resmi oleh Presiden RI Ke-5 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pada Bulan Januari 2008 di Kota Batubara, Sumatera Utara.²⁸

PNPM Mandiri Pedesaan dikelola oleh kementerian dalam negeri berdasarkan prinsip-prinsip yang bertumpu kepada pembangunan manusia, otonomi, desentralisasi, berorientasi kepada masyarakat, partisipasi, kesetaraan, dan keadilan gender, demokratis, transparan dan akuntabel, berdasarkan prioritas dan keberlanjutan. Namun, pengelolaan PNPM Mandiri tidak lagi ditangani oleh Kementerian Dalam Negeri melainkan sudah beralih ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Seiring terbitnya Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja dan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri, dimana sebagian tugas dan fungsi yang semula berada pada Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kemendagri, menjadi tugas dan fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT).

Awal pelaksanaan PPK yang selanjutnya dikenal dengan PNPM Mandiri Pedesaan dalam tahun 2005 merupakan salah satu kegiatan bantuan sosial bidang pemberdayaan masyarakat dengan alokasi anggaran APBN sebesar Rp. 42,1 miliar, ditujukan untuk 30 Provinsi yang terdiri dari 245 Kabupaten/Kota, dengan 1,592 Kecamatan per

²⁸ Arfah, Bendahara UPK PNPM Mandiri Bagian SPP, wawancara di Kantor UPK PNPM SPP Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara, tanggal 5 September 2018.

desa. Kemudian dalam tahun 2006, agar terjadi peningkatan kualitas kegiatan dan peningkatan manfaat kegiatan, maka target kepesertaan PNPM Mandiri Pedesaan diturunkan hanya untuk 29 Provinsi terdiri dari 232 Kabupaten, 1.144 Kecamatan, dan 18.007 Desa.

Alokasi anggarannya berasal dari APBN 80% dan APBD 20%, dana jumlahnya ditingkatkan rata-rata antara sebesar Rp. 0,5-1 miliar per Kecamatan, dihitung berdasarkan jumlah penduduk, indeks kapasitas fiskal daerah, potensi daerah, dan tingkat kemiskinannya. Lokasi sasaran programnya ditujukan kepada kecamatan yang diusulkan oleh pemerintah daerah dengan memberikan kontribusi dana APBD 20% dan Kecamatan yang tidak dialokasikan kegiatan PNPM Perkotaan. Satu siklus kegiatan diperkirakan dapat dikerjakan selama lima tahun baru dapat menunjukkan keberhasilannya, selanjutnya kedepan kegiatan terus berlanjut secara mandiri.²⁹

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan di Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara ini mulai beroperasi sejak Bulan Januari 2008. Bagi masyarakat khususnya para pelaku UMKM, mereka sangat merasakan betul manfaat dari program-program PNPM Mandiri ini, terutama untuk program dari dana yang dipinjamkan oleh PNPM Mandiri Pedesaan ini. Adapun bentuk-bentuk program PNPM Mandiri Pedesaan ini adalah:

- a. Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar (pembangunan infrastruktur) yang dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang secara ekonomi bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin. Untuk program ini, prasarana dan sarana yang dipilih harus mendukung pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat atau peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan dalam bidang kesehatan dan pendidikan.

²⁹ Sri Lestari Rahayu, *Bantuan Sosial di Indonesia Sekarang dan Kedepan*, Bandung: Fokus Media, 2012, h. 94

- b. Peningkatan pelayanan bidang pendidikan (pemberian beasiswa kepada anak-anak yang termasuk keluarga yang kurang mampu) serta pelaksanaan program-program latihan untuk memberikan keterampilan kepada masyarakat. Adapun tujuan pokok dari pemberian beasiswa ini adalah supaya masyarakat yang kurang mampu, dapat menyekolahkan anak-anaknya layaknya anak-anak yang lain. Untuk program ini, pihak PNPM Mandiri Pedesaan memberikan beasiswa dalam bentuk membelikan kebutuhan-kebutuhan atau perlengkapan anak-anak tersebut. Seperti: sepatu, baju, seragam, tas, dan kebutuhan lainnya. Kemudian latihan-latihan untuk memberikan keterampilan kepada masyarakat.
- c. Penambahan permodalan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (Simpan Pinjam untuk Perempuan). Adapun tujuan pokok dari program ini adalah mengembangkan potensi simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja. Tujuan lainnya adalah untuk memberikan kesempatan bagi kaum perempuan dalam meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha.

Dari ketiga program diatas, program yang langsung berperan terhadap peningkatan UMKM adalah program penambahan permodalan Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

3. Unit Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri

Peran Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah sebagai unit pengelola dan operasional pelaksanaan kegiatan antar desa. Pengurus UPK sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. UPK berasal dari anggota masyarakat yang diajukan oleh desa

berdasarkan hasil musyawarah desa dan selanjutnya dipilih dalam musyawarah antar desa. UPK mendapatkan penugasan melalui Musyawarah Antar Desa (MAD) atau Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), untuk menjalankan tugas pengelolaan dana program dan tugas pengelolaan dana perguliran.

Berdasarkan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) tahun 2015 Visi dan Misi UPK adalah sebagai berikut:

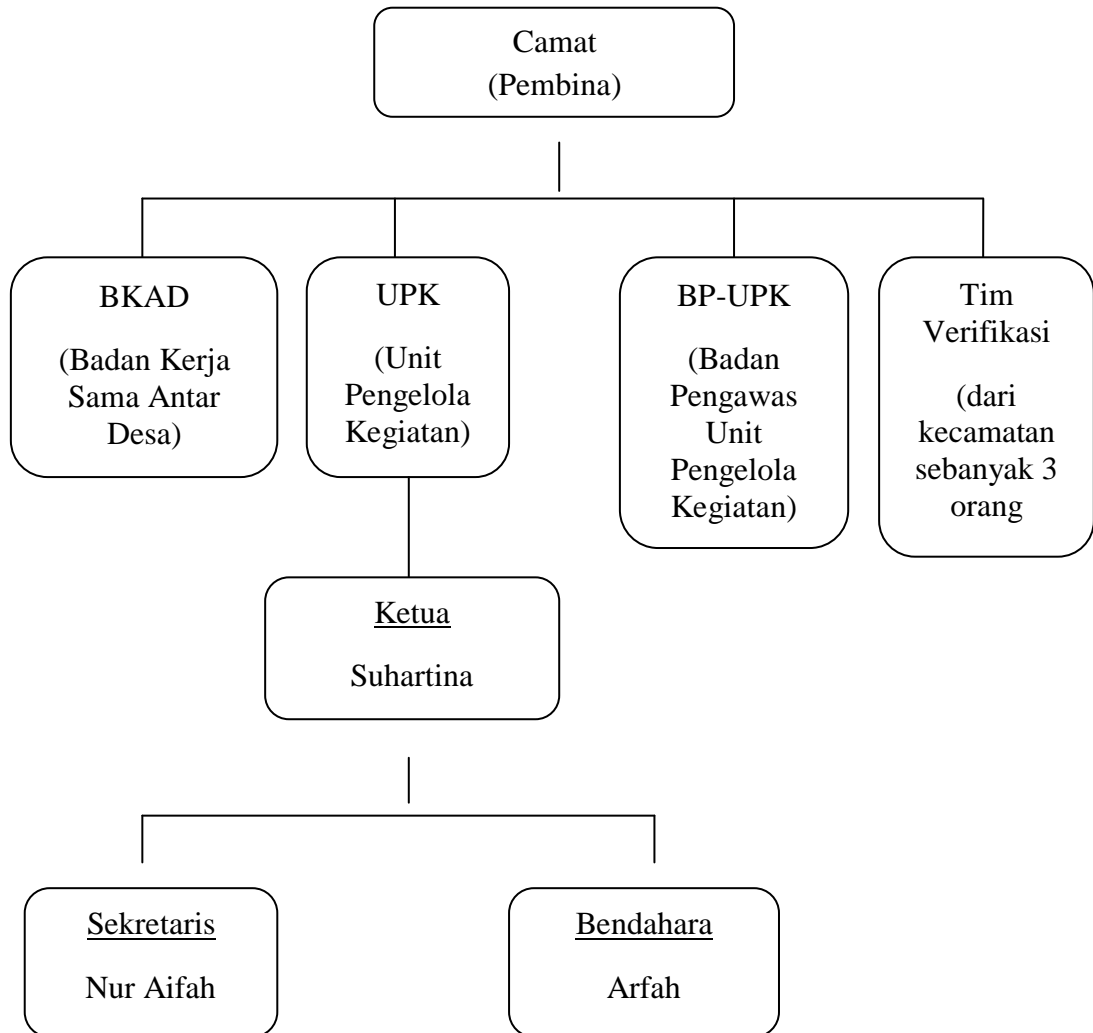
Visi: Terwujudnya kelembagaan yang profesional dan mampu mengantarkan masyarakat untuk meraih kesejahteraan serta kemandirian dalam pemberdayaan masyarakat.

Misi:

- 1) Pelestarian dan pengembangan pengelolaan dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan
- 2) Penguatan kelembagaan pengelolaan keuangan mikro dalam penyediaan dana bergulir guna mendukung kegiatan usaha masyarakat dalam kelompok-kelompok usaha, khususnya yang berdasarkan dari Rumah Tangga Miskin (RTM)
- 3) Peningkatan kapasitas kelompok simpan pinjam dan memfasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat dalam sistem pembangunan partisipatif yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat
- 4) Pengembangan jaringan kemitraan untuk mengembangkan usaha kelompok.

Adapun struktur kepengurusan UPK di Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara adalah sebagai berikut :

Gambar 2. Struktur Kepengurusan UPK di Kec. Medang Deras Kab. Batubara



4. Gambaran Umum dan Prosedur Simpan Pinjam Perempuan

Berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Pedesaan Tahun 2008 (Peraturan Departemen Dalam Negeri Nomor: 414.2/316/PMD), upaya pemberian dukungan terhadap PNPM Mandiri Pedesaan yang mempunyai tujuan percepatan penanggulangan kemiskinan maka kegiatan pengelolaan dana bergulir menjadi salah satu kegiatan yang memberikan kemudahan bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) untuk mendapatkan permodalan dalam bentuk kegiatan SPP. Dana bergulir merupakan seluruh dana program dan bersifat pinjaman yang dikelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK) bagi masyarakat untuk mendanai kegiatan ekonomi masyarakat yang disalurkan melalui kelompok-kelompok masyarakat. Dana bergulir ini tidak diperkenankan untuk mendanai kegiatan sektor riil yang dijalankan oleh pihak UPK. Simpan Pinjam Perempuan (SPP) merupakan salah satu bentuk kegiatan dana bergulir yang mempunyai kegiatan pengelolaan simpanan dan pinjaman yang termasuk dalam jenis Kelompok Simpan Pinjam (KSP) dengan ketentuan anggota khusus perempuan dan prioritas kelompok yang memiliki anggota RTM. Program SPP merupakan bentuk pinjaman tanpa agunan dengan sistem tanggung renteng. Kegiatan pengelolaan dana bergulir ini bertujuan:

- a. Memberikan kemudahan akses permodalan usaha baik kepada masyarakat sebagai pemanfaat maupun kelompok usaha.
- b. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada RTM dalam pemenuhan kebutuhan permodalan usaha yang tidak mempunyai akses langsung pada lembaga keuangan formal.

Mekanisme perguliran dana yang dimaksud yaitu dana pembayaran angsuran pinjaman yang diterima pihak UPK dari tiap anggota akan dipinjamkan kembali atau digulirkan pada kelompok lain yang mengajukan pinjaman. Oleh karena itu, apabila ada kelompok yang menunggak, maka akan terhambat pula penyaluran pinjaman pada

kelompok lain yang membutuhkan dan disitu pula kredit macet akan berlaku.

Ketentuan mengenai pendanaan dalam kegiatan dana bergulir SPP mengacu pada aturan perguliran dan Standar Operasional Prosedur (SOP) UPK yang telah disepakati yang memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Dana perguliran SPP hanya digunakan untuk pendanaan kegiatan SPP dengan alokasi dana sebesar 25 persen dari total dana PNPM Mandiri Pedesaan.
- b. Tidak diperkenankan memberikan pinjaman secara individu
- c. Adanya perjanjian pinjaman antara pihak UPK dengan kelompok pemanfaat dalam bentuk surat perjanjian utang
- d. Jangka waktu pinjaman SPP yaitu selama 1 tahun atau 12 bulan dengan sistem atau jadwal pembayaran angsuran tiap bulan dan tanggal jatuh tempo tiap kelompok disesuaikan dengan tanggal pencairan dana.
- e. Besarnya beban jasa pinjaman atau suku bunga pinjaman SPP yaitu 18 persen.
- f. Kelompok dapat diberikan Insentif Pengembalian Tepat Waktu (IPTW) sebagai stimulan sehingga terdorong untuk membayar tepat waktu sebelum tanggal jatuh tempo.

5. Mekanisme Pelaksanaan Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

Pelaksanaan SPP agar dapat dipahami secara benar oleh masyarakat khususnya kelompok pemanfaat SPP, maka dibentuk kader disetiap desa yang melaksanakan program SPP yang minimal terdiri satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang bertujuan untuk mendampingi kelompok dan membantu ketua kelompok. Musyawarah kegiatan perguliran dana SPP dilakukan setahun sekali pada saat akan pencairan dana dan sekaligus diadakan sosialisasi untuk memberitahu pada warga sekitar bahwa ada program pemberian pinjaman dari pemerintah berupa SPP. Mekanisme untuk dapat

memperoleh pinjaman dari program SPP yaitu dengan cara membentuk kelompok terlebih dahulu dengan jumlah anggota tidak boleh lebih dari 10 orang. Pembentukan kelompok dilakukan sendiri bukan oleh pihak UPK dengan penentuan ketua kelompok dipilih langsung oleh anggota melalui musyawarah.

Mekanisme pengajuan pinjaman SPP dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan pengajuan pinjaman dengan melalui beberapa tahapan yaitu :

- a. Pembuatan proposal pengajuan oleh ketua kelompok sebagai salah satu persyaratan yang berisi identitas tiap anggota, jenis usaha yang dijalankan dan besarnya pengajuan pinjaman dengan ketentuan besarnya pinjaman tiap anggota tidak boleh lebih dari Rp. 5.000.000,00
- b. Menyerahkan proposal pada pihak UPK SPP dengan disertai persyaratan lain yaitu fotocopy KTP, dan Kartu Keluarga (KK).
- c. Mengisi formulir atau disebut sebagai surat pegakuan utang untuk tiap anggota dan surat pernyataan kesanggupan tanggung renteng sebagai persyaratan pengajuan.

Setelah melaksanakan tahapan pengajuan pinjaman tersebut, maka akan dilakukan survei lapangan oleh tim verifikasi dari UPK SPP untuk pengajuan pinjaman yang pertama mengenai kelayakan memperoleh bantuan pinjaman dana bergulir dan kesesuaian antara jenis usaha yang dijalankan dengan besarnya pengajuan pinjaman. Kemudian setelah dinyatakan layak maka selanjutnya menunggu pengesahan dari Kepala Kecamatan dan setelah disahkan maka akan dilaksanakan pencairan dana SPP. Pencairan dana SPP dilakukan di Kantor Kepala Desa dan harus dihadiri oleh seluruh anggota kelompok karena dana pinjaman langsung diberikan pada masing-masing anggota tidak melalui ketua kelompok terlebih dahulu.

6. Ketentuan dan Pelaksanaan Pencairan Dana

Besarnya dana pinjaman yang diterima oleh tiap anggota pada saat pencairan terkadang tidak sesuai dengan nilai pengajuannya (*credit ratioing*). Hal ini dikarenakan untuk anggota yang baru pertama kali mengajukan pinjaman SPP disesuaikan dengan jenis usaha yang dijalankan dan kesanggupan pembayaran yang dilihat dari hasil survei lapangan oleh tim verifikasi. Adapun untuk anggota yang sudah mengajukan kembali, besarnya pinjaman yang diperoleh didasarkan pada kondisi pinjaman sebelumnya. Apabila pada periode sebelumnya terdapat tunggakan maka besarnya dana pinjaman yang akan diterima akan lebih kecil dari pinjaman sebelumnya.

Setiap anggota diwajibkan untuk menabung terlebih dahulu sebelum pencairan dana dilakukan. Hal ini terdapat dalam ketentuan pelaksanaan SPP karena sesuai dengan nama programnya yaitu Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sehingga harus ada kegiatan menabung atau menyimpan. Besarnya tabungan atau simpanan yaitu sebesar 10 persen dari total pinjaman. Apabila anggota ingin uang pinjaman yang diterimanya utuh maka anggota harus membayar simpanan terlebih dahulu sebelum dana pinjaman diterima pada saat pencairan. Akan tetapi, simpanan yang diwajibkan tersebut dapat juga dibayarkan dari jumlah pinjaman yang akan diterima anggota tetapi dengan konsekuensi jumlah pinjaman yang diterima tidak utuh karena dikurangi simpanan sebesar 10 persen. Hal ini bertujuan untuk tidak memberatkan anggota karena harus menyediakan sejumlah uang terlebih dahulu untuk membayar simpanan dan memberikan kebebasan pada anggota. Simpanan sebesar 10 persen ini dalam prosedur SPP disebut sebagai tabungan tanggung renteng.

7. Pelaksanaan Sistem Tanggung Renteng SPP

Sistem tanggung renteng dalam pelaksanaan SPP merupakan penanggungan secara bersama dalam upaya menghindari pinjaman macet yakni berupa simpanan yang disebut sebagai tabungan tanggung renteng yang berasal dari tiap anggota. Tabungan tanggung renteng ini berfungsi untuk membantu anggota yang mengalami kesulitan pada saat pembayaran angsuran saat jatuh tempo sehingga ditanggulangi terlebih dahulu dari tabungan tanggung renteng tersebut. Adanya tabungan ini bertujuan untuk mengantisipasi atau menghindari pembayaran macet dari satu anggota yang akan berdampak buruk pada semua anggota (satu kelompok). Ini dikarenakan apabila tidak ditanggulangi terlebih dahulu maka satu kelompok yang akan menanggung akibatnya. Hal ini juga disebut sebagai tanggung renteng, karena ulah dari satu anggota akibatnya akan ditanggung bersama. Akibat yang ditanggung yakni untuk pengajuan pinjaman kembali harus menunggu anggota yang macet untuk melunasi pembayarannya terlebih dahulu, sehingga akan menghambat anggota yang lain dalam pengajuan pinjaman tahap berikutnya.

8. Sanksi Tunggakan Pembayaran Pinjaman

Bentuk sanksi yang diberikan kepada anggota yang menunggak pembayaran pinjaman berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) UPK SPP yaitu apabila pada tahap berikutnya mengajukan pinjaman kembali maka besarnya pinjaman akan lebih kecil dari pinjaman semula. Akan tetapi, apabila anggota tersebut sering menunggak pembayaran maka tidak akan diberikan pinjaman kembali oleh pihak UPK pada periode berikutnya. Hal ini karena menyebabkan dana menjadi terhambat untuk digulirkan kembali. Pihak UPK SPP menawarkan dua pilihan kepada anggota kelompok yang menunggak pembayaran pinjaman yaitu:

- 1) *Rescheduling*, yaitu dengan tetap diberi pinjaman pada tahap berikutnya, tetapi besar jumlah pinjaman lebih rendah dari besarnya jumlah pinjaman awal.
- 2) Jangka waktu pembayaran pinjaman diperpanjang tetapi dengan risiko untuk pengajuan tahap berikutnya harus mengunggu anggota yang macet tersebut melunasinya terlebih dahulu.³⁰

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Analisis Sistem Pengendalian Intern Piutang yang Diterapkan Oleh UPK Kec. Medang Deras Kab. Batubara

Piutang merupakan salah satu elemen penting dalam sebuah perusahaan, bank maupun lembaga nonbank, maka dari itu pengendalian intern piutang dijadikan sebagai suatu alat yang harus dijalankan seefektif mungkin demi menjamin keberlangsungan piutangnya, piutang diberikan dalam periode waktu tertentu, semakin lama waktunya, maka akan semakin besar risiko piutang macet bahkan piutang tak tertagihnya, dan tentunya dapat merugikan pihak yang memberikan piutang. Pengendalian intern piutang sekurang-kurangnya dimulai sebelum piutang diberikan kepada nasabah seperti pengajuan piutang, persetujuan piutang, pencairan dana, sampai pengembalian piutang.

Dengan demikian, maksud dari pernyataan diatas yaitu untuk mengetahui bagaimana sistem pengendalian intern piutang yang diterapkan di UPK bagian SPP PNPM Mandiri Pedesaan Kec. Medang Deras Kab. Batubara , bagaimana persyaratan yang harus dipenuhi untuk pengajuan piutang, bagaimana mekanisme pembayaran angsuran yang diterapkan dan apa tindakan yang akan dilakukan untuk mengurangi dan mengatasi risiko kredit macet.

³⁰ Fikanti Zuliastri, “*Dampak Perguliran Dana SPP PNPM Mandiri Pedesaan Terhadap Pengembangan UMKM di Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak Banten*”, Jurnal Ekonomi, h. 58-60.

Untuk itu, peneliti melakukan wawancara langsung dengan 3 subjek dari pengurus UPK bagian SPP PNPM Mandiri Pedesaan Kec. Medang Deras Kab. Batubara yaitu ibu Adapun hasil wawancara tersebut diuraikan dibawah ini.

Pertanyaan 1: Bagaimana sistem pengendalian intern piutang yang diterapkan di PNPM Mandiri pedesaan kec. Medang Deras ini ?

Subjek UPK I

Nama Subjek : Suhartina
Jabatan : Ketua UPK
Umur : 40 tahun

Penuturan hasil wawancara UPK I :

“Sistem yang digunakan yaitu sistem tanggung renteng yang maksudnya piutang diberikan secara kelompok dimana setiap kelompok ada ketua yang berfungsi untuk mengutip angsuran piutang setiap bulan dan diserahkan ke UPK.”

Subjek UPK II

Nama Subjek : Nur Aifah
Jabatan : Sekretaris
Umur :

Penuturan Hasil wawancara UPK II :

“ Sistemnya tanggung renteng, hutangnya ditanggung bersama oleh tiap-tiap kelompok dengan di koordinir masing-masing ketua kelompok, jadi bila ada yang menunggak dalam pembayaran maka akan dibayarkan sementara oleh kelompok.”

Subjek UPK III

Nama Subjek : Arfah

Jabatan : Bendahara

Umur :

Penuturan hasil wawancara UPK III :

“ Sama seperti yang dikatakan kak Aifah dan Kak Suhartina ya kalo sistemnya disini tanggung renteng oleh kelompok SPP jadi hutangnya ditanggung semua anggotanya, pembayaran angsuran diserahkan keketua kelompok, baru sesudah itu disetorkan kepada kami bagian UPK.

Pertanyaan ke 2 : Bagaimana syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan piutang ?

Subjek UPK I:

“ Syaratnya cukup mudah yaitu membuat kelompok SPP minimal 5 orang setelah itu membuat proposal pengajuan hutang dengan melampirkan fotocopy KTP, KK dan surat persetujuan dari keluarga, setelah proposal diajukan kelompok tersebut di verifikasi, setelah di verifikasi layak atau tidaknya kelompok tersebut untuk diberikan pinjaman jika layak, barulah membuat SPPB (Surat Perjanjian Pemberian Bantuan) barulah setelah itu dana SPP dapat dicairkan.”

Subjek UPK II:

“Syarat tentu ada yaitu membentuk kelompok terlebih dahulu, baru mengajukan proposal kelompok dengan menyertakan fotocopy KTP, KK dan surat persetujuan keluarga yang berguna apabila si penghutang mengalami suatu musibah yang tak diduga maka hutangnya akan diambil alih oleh keluarga atau ahli waris.”

Subjek UPK III:

“Syaratnya mengajukan proposal, fotocopy KTP, KK, surat persetujuan keluarga.

Pertanyaan ke 3 : Bagaimana mekanisme pembayaran piutang yang diterapkan ?

Subjek UPK I:

“Untuk pembayarannya dikoordinir oleh ketua kelompok masing-masing baru setelah itu disetor ke UPK.”

Subjek UPK II:

“Pembayaran iuran dibayar oleh anggota ke ketuanya dulu, setelah itu baru ketua yang menyetor ke UPK, dan apabila ada yang nunggak akan dibayarkan oleh kelompok dulu untuk menghindari tunggakan.”

Subjek UPK III:

“ Sama seperti yang dikatakan ketua kalo pembayaran biasanya dilakukan oleh ketua yang sudah mengutip dari anggota, baru diserahkan ke tim UPK, tak perlu repot-repot tiap-tiap anggota datang menyerahkannya langsung ke UPK cukup ketua saja yang mewakili.”

Pertanyaan ke 4: Apa tindakan yang dilakukan untuk mengurangi dan mengatasi risiko kredit macet ?

Subjek UPK I:

“ Caranya dengan sistem tanggung renteng tadi, jadi apabila ada yang tidak dapat membayar setelah jatuh tempo maka akan menjadi tanggung jawab bersama, jika kelompok tidak

menyelesaikan hutangnya maka pencairan dana selanjutnya pada kelompok tersebut tidak bisa dilakukan sebelum melunasi hutang sebelumnya, diberi peringatan dari pihak kecamatan, door to door (mendatangi tiap-tiap anggota kelompok yang bermasalah dalam pembayaran) dan jika ada penyalahgunaan dana akan diselesaikan dengan cara kekeluargaan, namun jika tidak bisa ditangani maka akan menempuh jalur hukum dan tidak diizinkan mengajukan pinjaman lagi.”

Subjek UPK II:

“ Biasanya jika ada yang menunggak kami akan door to door ke anggota kelompok yang bermasalah.”

Subjek UPK III:

“ Kalo soal menunggak pertama kami beri teguran atau langsung menemui kelompok yang menunggak tersebut, namun kalo tetap bandel gak mau bayar kami akan menggunakan jalur hukum dan yang menunggak tersebut tidak akan diberikan pinjaman lagi.”

Berdasarkan dari 4 wawancara diatas dengan 3 subjek dari tim UPK sistem pengendalian intern piutang yang diterapkan di PNPM Mandiri pedesaan bagian SPP kec. Medang Deras kab. Batubara adalah tanggung renteng yang telah disepakati dengan bukti surat pernyataan tanggung renteng yang dilampirkan di dalam proposal pengajuan pinjaman. Dengan adanya sistem ini akan mengurangi risiko kredit macet karena tunggakan anggota akan ditanggung bersama agar pembayaran iuran sesuai dengan tagihan dan tepat waktu. Adapun dana yang disalurkan merupakan dana yang bergulir sehingga dana tersebut akan terus berputar dari kelompok 1 ke kelompok yang lainnya.

Selain itu penulis juga menanyakan tentang syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan hutang oleh kelompok SPP, berdasarkan hasil wawancara penulis mengambil kesimpulan bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh kelompok SPP yaitu membuat kelompok terlebih dahulu, kemudian mengajukan proposal dengan persetujuan kepala desa, dan melampirkan dokumen usulan pengajuan pinjaman yaitu daftar nama calon penerima dana SPP, fotocopy KTP, KK, membuat SPPB(Surat Perjanjian Pemberian Bantuan) yang menyatakan sistem tanggung renteng, dan surat persetujuan dari keluarga maupun suami.

Untuk mekanisme pembayaran seperti yang dipaparkan pada wawancara diatas yaitu menyetor iuran hutang kepada ketua setelah itu ketua akan menyerahkannya ke UPK dan pengutipan hutang dilakukan setiap bulan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas mekanisme proses pengajuan piutang, pemberian piutang, penyaluran hingga pengembaliannya sangat mudah namun hati-hati. Piutang yang diberikan UPK adalah dana bergulir atas dasar kepercayaan karena dana pinjaman diberikan tanpa ada jaminan apapun. Oleh karena itu, rentan terhadap adanya penyelewengan. Maka dari itu harus ada penanganan untuk menghindari dan mengatasi masalah pengembelian/kredit macet. Berdasarkan wawancara ada beberapa tahapan yang dilakukan seperti UPK akan melakukan penagihan baik itu secara langsung maupun via telepon untuk memberikan teguran, jika tidak bisa dengan cara tersebut UPK akan mengadakan pertemuan dan menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, jika dengan cara tersebut masih belum teratasi maka akan ditempuh dengan jalur hukum. Jadi, sistem yang diterapkan telah diatur sedemikian rupa dengan sistem tanggung renteng dengan maksud untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pinjaman yang akan digunakan sebagai modal usaha.

2. Analisis Kolektibilitas Piutang pada UPK Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara

a. Kolektibilitas Berdasarkan Saldo Pinjaman

Kolektibilitas adalah suatu penggolongan kredit berdasarkan cepat atau lambatnya pembayaran kredit, penggolongan ditujukan untuk melihat bagaimana kualitas kredit yang diberikan, sehingga lembaga atau bank yang memberikan kredit dapat mengetahui dan mengantisipasi risiko kerugian akibat kredit yang bermasalah. Kolektibilitas kredit digolongkan menjadi lima bagian yaitu; L untuk Lancar, DPK untuk Dalam Perhatian Khusus, KL untuk Kurang Lancar, D untuk Diragukan, dan M untuk Macet. Berikut ini adalah tabel kolektibilitas berdasarkan saldo pinjaman UPK Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara tahun 2015 s/d 2017.

**Tabel 4.1 Kolektibilitas Berdasarkan Saldo Pinjaman UPK
Kec. Medang Deras Kab. Batubara**

No	Klasifikasi	Tahun		
		2015	2016	2107
1	Kol I/L	697.420.000	848.560.000	1.082.195.000
2	Kol II/DPK	89.497.000	101.608.000	94.123.000
3	Kol III/KL	94.679.000	203.382.000	229.866.000
4	Kol IV/D	153.031.000	126.017.000	222.483.000
5	Kol V/M	74.510.000	74.714.000	220.515.000
Total saldo pinjaman		1.109.137.000	1.354.281.000	1.849.182.000

Sumber: UPK PNPM Mandiri Bagian SPP Kec. Medang Deras Kab. Batubara

Berdasarkan pada tabel diatas menunjukkan bahwa tahun 2015 kolektibilitas I/L sebesar Rp. 697.420.000, kolektibilitas II/DPK sebesar Rp. 89.497.000, kolektibilitas III/KL sebesar Rp. 94.679.000, kolektibilitas IV/D sebesar Rp. 153.031.000, sedangkan kolektibilitas V/M sebesar Rp. 74.510.000 dengan total saldo pinjaman Rp. 1.109.137.000. Untuk tahun 2016 kolektibilitas I/L sebesar Rp. 848.560.000, kolektibilitas II/DPK sebesar Rp. 101.608.000, kolektibilitas III/KL sebesar Rp. 203.382.000, kolektibilitas IV/D sebesar Rp. 126.017.000, sedangkan kolektibilitas V/M sebesar Rp. 74.714.000, adapun total saldo pinjamannya sebesar Rp. 1.354.281.000. Tahun 2017 kolektibilitas I/L sebesar Rp. 1.082.195.000, kolektibilitas II/DPK sebesar Rp. 94.123.000, kolektibilitas III/KL sebesar Rp. 229.866.000, kolektibilitas IV/D sebesar Rp. 222.483.000, dan terakhir kolektibilitas V/M sebesar Rp. 220.515.000 dengan total saldo pinjaman sebesar Rp. 1.849.182.000.

b. Penggolongan Kolektibilitas Kredit Selama 3 Tahun Terakhir

Berikut penggolongan kolektibilitas UPK selama 3 tahun terakhir, berdasarkan sumber data yang diperoleh dari UPK SPP.

Tabel 4.2 Data Penggolongan Kolektibilitas UPK Kec. Medang Deras Kab. Batubara Periode Tahun 2015 s/d 2017

No	Klasifikasi	Tahun		
		2015	2016	2017
1	Kol I/L	697.420.000	848.560.000	1.082.195.000
2	Kol II/DPK	89.497.000	101.608.000	94.123.000
3	Kol III/KL	94.679.000	203.382.000	229.866.000
4	Kol IV/D	153.031.000	126.017.000	222.483.000
5	Kol V/M	74.510.000	74.714.000	220.515.000

Sumber: UPK PNPM Mandiri Bagian SPP Kec. Medang Deras Kab. Batubara

Berdasarkan penyajian dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk klasifikasi kolektibilitas I/L pada tahun 2015 ada sebesar Rp. 697.420.000 dari total pinjaman sebesar Rp. 1.109.137.000, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2016 sebesar Rp. 848.560.000 dengan saldo pinjaman Rp. 1.354.281.000. Sedangkan untuk tahun 2017 mengalami peningkatan lagi sebesar Rp. 1.082.195.000 dari total pinjaman sebesar Rp. 1.849.182.000. Sedangkan untuk klasifikasi kolektibilitas II/DPK pada tahun 2015 sebesar Rp. 89.497.000, dan pada tahun 2016 mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp. 101.608.000, dan turun kembali pada tahun 2017 sebesar Rp. 94.123.000. untuk klasifikasi kolektibilitas III/KL dan V/M terus mengalami peningkatan yang drastis, sedangkan klasifikasi kolektibilitas IV/D pada tahun 2015 sebesar Rp. 153.031.000, dan pada tahun 2016 mengalami penurunan yaitu Rp. 126.017.000, namun pada tahun 2017 naik lagi sebesar Rp. 222.483.000.

c. Rasio Kredit Berdasarkan data Kolektibilitas

Berikut ini adalah perhitungan rasio kredit terhadap total kredit berdasarkan data kolektibilitas yang sudah diperoleh dari tahun 2015 s/d 2017 dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Rasio Kredit Lancar

$$\text{Tahun 2015} = \frac{697.420.000}{1.109.137.000} \times 100\% = 62,87\%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{848.560.000}{1.354.281.000} \times 100\% = 62,65\%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{1.082.195.000}{1.849.182.000} \times 100\% = 58,52\%$$

Dari hasil perhitungan rasio kredit lancar terhadap total kredit oleh UPK diketahui mengalami penurunan setiap tahunnya yaitu pada tahun 2015 sebesar 62,87%, pada tahun 2016 sebesar 62,65%, dan tahun 2017 sebesar 58,52%.

2) Rasio Kredit Dalam Perhatian Khusus

$$\text{Tahun 2015} = \frac{89.497.000}{1.109.137.000} \times 100\% = 8,06\%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{101.608.000}{1.354.281.000} \times 100\% = 7,5\%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{94.123.000}{1.849.182.000} \times 100\% = 5,08\%$$

Besarnya rasio kredit dalam perhatian khusus terus mengalami penurunan yaitu pada tahun 2015 sebesar 8,06%, pada tahun 2016 sebesar 7,5% sedangkan pada tahun 2017 turun lagi sebesar 5,08%.

3) Rasio Kredit Kurang Lancar

$$\text{Tahun 2015} = \frac{94.697.000}{1.109.137.000} \times 100\% = 8,53\%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{203.382.000}{1.354.281.000} \times 100\% = 15,01\%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{229.866.000}{1.849.182.000} \times 100\% = 12,43\%$$

Dari hasil perhitungan data diatas dapat diketahui untuk rasio kolektibilitas kredit kurang lancar pada tahun 2015 sebesar 8,53% dan pada tahun 2016 naik sebesar 15,01% sedangkan pada tahun 2017 turun lagi sebesar 12,43%.

4) Rasio Kredit Diragukan

$$\text{Tahun 2015} = \frac{153.031.000}{1.109.137.000} \times 100\% = 13,79\%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{126.017.000}{1.354.281.000} \times 100\% = 9,3\%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{222.483.000}{1.849.182.000} \times 100\% = 12,03\%$$

Besarnya rasio untuk kategori kredit diragukan berdasarkan perhitungan diatas yaitu pada tahun 2015 sebesar 13,79% dan pada tahun 2016 turun sebesar 9,3% sedangkan pada tahun 2017 naik lagi sebesar 12,03%.

5) Rasio Kredit Macet

$$\text{Tahun 2015} = \frac{74.510.000}{1.109.137.000} \times 100\% = 6,71\%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{74.714.000}{1.354.281.000} \times 100\% = 5,51\%$$

$$\text{Tahunr 2017} = \frac{220.515.000}{1.849.182.000} \times 100\% = 11,92\%$$

Untuk yang terakhir yaitu rasio kolektibilitas kredit macet berdasarkan perhitungan diatas pada tahun 2015 sebesar 6,71%, dan pada tahun 2016 turun sebesar 5,51%, namun pada tahun 2017 naik lagi sebesar 11,92%.

Setelah perhitungan rasio kredit pada masing-masing kategori kolektibilitas tersebut maka dapat disajikan tabel rasio kolektibilitas periode 2015 s/d 2017 sebagai berikut:

**Tabel 4.3 Rasio Kolektibilitas Kredit Terhadap Total
Kredit Periode 2015 s/d 2017**

Tahun	Kolektibilitas(%)				
	L	DPK	KL	D	M
2015	62,87%	8,06%	8,53%	13,79%	6,71%
2016	62,65%	7,5%	15,01%	9,3%	5,51%
2017	58,52%	5,08%	12,43%	12,03%	11,92%
Total	184,04%	20,64%	35,97%	35,12%	24,14%
Rata- Rata	61,34%	6,88%	11,99%	11,7%	8,04%

Sumber: Data diolah

Dari hasil perhitungan rasio kredit yang kemudian disajikan dalam bentuk tabel, analisis selama 3 tahun terakhir dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Kredit lancar pada tahun 2015 s/d 2017 terus mengalami penurunan.
- 2) Kredit dalam perhatian khusus juga terus mengalami penurunan yaitu pada tahun 2015 sebesar 8,06%, tahun 2016 sebesar 7,5% dan pada tahun 2017 sebesar 5,08%.
- 3) Kredit kurang lancar pada tahun 2015 sebesar 8,53%, pada tahun 2016 naik sebesar 15,01%, namun pada tahun 2017 turun lagi dengan persentase sebesar 12,43%.
- 4) Kredit diragukan yaitu dari tahun 2015 ke tahun 2016 turun dari angka persentase sebesar 13,79% menjadi sebesar 9,3%, namun mengalami kenaikan lagi pada tahun 2017 yaitu sebesar 12,03%
- 5) Untuk kredit macet pada tahun 2015 ke 2016 mengalami penurunan namun pada tahun 2017 mengalami peningkatan yang cukup besar.

d. Perhitungan *Nonperforming Loan* (NPL)

Setelah mengetahui rasio kolektibilitas kredit periode 3 tahun terakhir langkah selanjutnya yaitu menganalisis bagaimana kualitas kredit dengan perhitungan yang digunakan yaitu perhitungan *Nonperforming loan* atau NPL berdasarkan data kolektibilitas yang diperoleh. Kredit yang dikategorikan kredit bermasalah yaitu adalah kategori kredit Kurang Lancar (KL), diragukan (D), dan Macet (M). Berikut ini adalah data NPL selama 3 tahun terakhir:

**Tabel 4.4 Data Nonperforming Loan UPK SPP Kec.
Medang Deras Kab. Batubara Tahun 2015 s/d 2017**

No	Kategori NPL	Tahun			Total
		2015	2016	2017	
1	Kol.III/KL	94.679.000	203.382.000	229.866.000	527.927.000
2	Kol.IV/D	153.031.000	126.017.000	222.483.000	501.563.000
3	Kol.V/M	74.510.000	74.714.000	220.515.000	369.739.000

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui kredit kategori KL dan M selama 3 tahun terakhir terus mengalami peningkatan, sedangkan kategori kredit D dari tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami penurunan namun di tahun 2019 meningkat pesat. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa besarnya kredit kategori KL, D, dan M dapat mempengaruhi penilaian kualitas kredit selama 3 tahun terakhir.

Untuk menghitung rasio kredit NPL menggunakan rumus:

$$\text{NPL} = \frac{\text{KL} + \text{D} + \text{M}}{\text{Kredit yang diberikan}} \times 100\%$$

Untuk mempermudah perhitungan berikut akan disajikan tabel kolektibilitas kredit kategori KL, D, dan M.

**Tabel 4.5 Total Kredit Kategori KL, D, dan M UPK SPP
Kec. Medang Deras Kab. Batubara**

Kategori NPL	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
Kurang Lancar	94.679.000	203.382.000	229.866.000
Diragukan	153.031.000	126.017.000	222.483.000
Macet	74.510.000	74.714.000	220.515.000
Total KL,D,M	322.220.000	404.113.000	672.864.000
Total Pinjaman	1.109.137.000	1.354.281.000	1.849.182.000

Sumber: Data diolah

- 1) Perhitungan NPL berdasarkan kategori kolektibilitas pada tahun 2015:

$$NPL = \frac{322.220.000}{1.109.137.000} \times 100\% = 29,05\%$$

Berdasarkan perhitungan diatas, besarnya rasio NPL pada tahun 2015 berdasarkan jumlah dari kredit kurang lancar, diragukan dan kredit macet adalah sebesar 29,05%

- 2) Perhitungan NPL berdasarkan kategori kolektibilitas pada tahun 2016:

$$NPL = \frac{404.113.000}{1.354.281.000} \times 100\% = 29,83\%$$

Berdasarkan perhitungan diatas, besarnya rasio NPL pada tahun 2016 berdasarkan jumlah dari kredit kurang lancar, diragukan dan kredit macet adalah sebesar 29,83%

3) Perhitungan NPL berdasarkan kategori kolektibilitas pada tahun 2017:

$$\text{NPL} = \frac{672.864.000}{1.849.182.000} \times 100\% = 36,38\%$$

Perhitungan NPL berdasarkan kategori kolektibilitas pada tahun 2017 adalah sebesar 36,38%

Setelah diketahui rasio NPL berdasarkan kategori kolektibilitaas kurang lancar, diragukan, dan macet maka dapat disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 4.6 Hasil Perhitungan Nonperforming Loan UPK SPP
Kec. Medang Deras Kab. Batubara Periode 2015 s/d 2017**

Tahun	Nonperforming Loan (%)	Pertumbuhan (%)
2015	29,05%	-
2016	29,83%	(0,78%)
2017	36,38%	(6,55%)
Rata-Rata	31,75%	

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat dianalisis bahwa perhitungan NPL selama tiga tahun terakhir dari 2015 s/d 2017 rata-rata pertumbuhan sebesar 31,75% dengan rincian pada tahun 2015 sebesar 29,05% pada tahun 2016 sebesar 29,83% dan tahun 2017 sebesar 36,75%. Besarnya angka rata-rata NPL selama tiga tahun terakhir pada UPK bagian SPP dalam kreditnya dapat dikatakan tinggi karena selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Berdasarkan perhitungan-perhitungan yang dilakukan diatas maka yang terakhir yang akan dilakukan analisa pada semua kategori kolektibilitas selama tiga tahun terakhir yang akan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.7 Analisa Data Kolektibilitas UPK SPP Kec.
Medang Deras Kab. Batubara Tahun 2015 s/d 2017**

Tahun	Kolektibilitas(%)					NPL
	L	DPK	KL	D	M	
2015	62,87%	8,06%	8,53%	13,79%	6,71%	29%
2016	62,65%	7,5%	15,01%	9,3%	5,51%	30%
2017	58,52%	5,08%	12,43%	12,03%	11,92%	36%
Total	184,04%	20,64%	35,97%	35,12%	24,14%	95%
Rata-Rata	61,34%	6,88%	11,99%	11,7%	8,04%	32%

Sumber: Data diolah

Berdasarkan perhitungan diatas menunjukkan bahwa selama tiga tahun terakhir persentase rata-rata kolektibilitas untuk kategori lancar sebesar 61,34%, dalam perhatian khusus 6,88%, kurang lancar 11,99%, diragukan 11,7%, dan macet sebesar 8,04%.

Kemudian untuk analisis NPL terlihat pada rata-rata tiga tahun terakhir sebesar 32%, hal ini disebabkan karena kinerja di setiap tahunnya mengalami penurunan dan puncaknya pada kinerja tahun 2017 dimana NPL nya berada pada angka 36%. Adapun menurut ketentuan Bank Indonesia saat ini adalah jika persentasenya melebihi dari angka 5% maka akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank. Adapun penaksiran klasifikasinya:

- 1) Risiko rendah (low) bila masih berada dibawah 5%
- 2) Risiko sedang (moderat) bila berada pada angka 5-10%
- 3) Risiko tinggi (high) bila berada diatas 10%

Berdasarkan klasifikasi tersebut semakin kecil angka persentase NPL maka kinerja kreditnya semakin baik, sedangkan jika semakin besar maka menunjukkan kinerja pengendalian intern piutangnya semakin tidak profesional.

NPL pada tahun 2015 sudah mencapai angka yang signifikan yaitu sebesar 29% disusul dengan tahun 2016 dan 2017 yang terus mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja di setiap tahunnya sangat rendah dan memberikan indikasi bahwa tingkat risiko yang dihadapi sangat tinggi. Maka dari itu penulis mengambil kesimpulan dari analisis diatas bahwa NPL 3 tahun terakhir tersebut berada pada kategori tinggi (high) dikarenakan angka persentase NPL berada diatas 10% yaitu mencapai angka 32% dan tingginya angka persentase NPL menunjukkan bahwa sistemnya belum memenuhi kriteria sehingga bisa dikategorikan pengelolaan piutang macetnya belum baik.

3. Analisis Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Intern Piutang pada UPK SPP Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara

Efektivitas adalah keberhasilan suatu pertanggung jawaban terhadap tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan, ketika kontribusi yang dihasilkan semakin mendekati sasaran tersebut, maka semakin tinggi tingkat efektivitasnya. Oleh karena itu untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerapan sistem pengendalian intern piutang oleh UPK SPP Kec. Medang Deras Kab. Batubara penulis menganalisa judul tersebut sebagai berikut:

a. Efektivitas berdasarkan sistem pengendalian yang digunakan

Berdasarkan hasil wawancara dengan tim UPK SPP Kec. Medang Deras Kab. Batubara sepakat bahwa penerapan sistem pengendalian piutangnya sudah cukup bagus yaitu dengan tanggung renteng, selain itu juga mekanisme penyaluran maupun pengembalian dan persyaratan mudah dilakukan dan tanpa jaminan. Dana bergulir yang dipraktekkan juga menjamin keberlangsungan piutang oleh UPK karena dana yang dikucurkan akan terus bergulir dari satu kelompok ke

kelompok yang lainnya. Dan berdasarkan hasil analisis pada sistem pengendalian intern piutang prosedur/mekanisme yang mereka terapkan juga telah sesuai dengan SOP.

b. Efektivitas berdasarkan rasio perhitungan kolektibilitas

Mengenai keefektifan dalam menganalisa rasio perhitungan kolektibilitas yang ada pada laporan kolektibilitas pinjaman SPP, berdasarkan analisis kolektibilitas selama 3 tahun terakhir rata-rata persentase kolektibilitas untuk kategori lancar sebesar 61,34%, adapun angka rata-rata kredit *nonperforming loannya* berada pada angka 32% dan masuk kedalam kategori risiko tinggi (high) yang artinya belum dapat dikatakan cukup efektif dalam pengelolaan piutangnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pengendalian intern piutang yang diterapkan di kantor PNPM Mandiri bagian SPP Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara adalah tanggung renteng dengan sanksi lokal dan sanksi kekeluargaan. Tanggung renteng adalah perjanjian piutang dimana tanggung jawab terhadap hutang ditanggung dalam kelompok dan saling bertanggung jawab atas setiap hutang yang dipinjam dan keputusan yang akan diambil maupun sanksi yang diberikan untuk mengatasi kredit yang macet. Kolektibilitas piutang selama tiga tahun terakhir berada pada persentase kolektibilitas untuk kategori lancar sebesar 61,34%, kredit dalam perhatian khusus sebesar 6,88%, kurang lancar sebesar 11,99% sedangkan diragukan sebesar 11,7% dan yang terakhir kategori kredit macet sebesar 8,04%, dengan rata-rata *nonperforming loan* sebesar 32%. Persentase ini menunjukkan bahwa piutang selama tiga tahun terakhir kurang baik dengan kolektibilitas kredit lancarnya 61,34% dengan NPL nya berada pada kategori risiko tinggi (high). Dengan angka persentase sebesar 32%. Dari kesimpulan angka persentase diatas Keefektivitasan pengendalian piutangnya berdasarkan hasil rasio kolektibilitas NPL kurang baik namun perguliran piutangnya masih berlanjut sampai sekarang karena program SPP ini merupakan program pemerintah yang bersifat bantuan sosial dengan visi misi yang positif demi meningkatkan taraf hidup dengan memberikan pembiayaan usaha untuk ibu-ibu RTM agar menjadi lebih mandiri dan produktif dalam mengembangkan usaha dan membuka lapangan pekerjaan walaupun kecil-kecilan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan penulis berdasarkan informasi dan hasil penelitian yang didapatkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil perhitungan kolektibilitas dengan penilaian pada kredit *nonperforming loan* keadaan kredit yang di salurkan masih tergolong kurang baik dengan risiko high, hal ini menandakan harus adanya pembenahan piutang melalui beberapa cara dalam masalah penanganan kredit macet agar tahun tahun kedepannya rasio kolektibilitasnya semakin membaik dan kredit NPL nya semakin rendah.
2. Untuk menjamin keberlangsungan piutang penulis menyarankan agar selalu menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam sistem tanggung renteng yang dijadikan pedoman dan selalu menjalin kerja sama yang baik dari semua pihak yang berpengaruh dengan SPP ini seperti antara kepala Desa, UPK SPP, ketua kelompok dan anggota kelompok.
3. Penulis menyarankan kepada UPK SPP untuk menambah tenaga ahli untuk menjadi keanggotaan kepengeurusan UPK dikarenakan tim pengurus hanya berjumlah tiga orang yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara sehingga memungkinkan adanya penggandaan tugas seperti kepengurusan perguliran, pencairan hingga pengembalian, bahkan penanganan kredit macet.

DAFTAR PUSTAKA

Agoes, Sukrisno. *Auditing, Edisi keempat Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat, 2012

Arens A. Alvin. *Auditing Suatu Pendekatan Terpadu*. Cetakan Keenam, Buku Satu. Terjemahan Ilham Tjakra Kusuma. Jakarta: Erlangga, 2001.

Boyton, William C, dkk. *Modern Auditing*, Terjemahan Gina Gania dan Ichsan Setiyobudi. Jakarta: Erlangga, 2003.

Budi, Setia, Irawan, Hengki. *Bijak Mengelola piutang Smart In Accounting Receivable*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2011.

Hery. *Auditing 1 Dasar-dasar Pemeriksaan Akuntansi*. Cetakan Pertama. Jakarta: Kencana, 2011.

Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.

Kashmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

McLeod, Raymond, George P. Schell. *Sistem Informasi Manajemen*. Terjemahan Ali Akbar dan Afia Fitriani. Surabaya: Salemba Empat, 2008.

Mulyadi. *Sistem Akuntansi*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat, 2002.

Mulyadi. *Auditing*. Cetakan Pertama, Buku Satu, Edisi Keenam. Jakarta: Salemba Empat, 2006.

Purhantara, W. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Rivai, Veithzal,dkk. *Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Riyanto, Bambang. *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat, 2007.

Sugiono, Dr. *Metode Pengendalian Bisnis Cetakan ke-16*. Bandung: Alfabeta. 2012.

Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta : Kencana Pramedia Grup, 2013.
Sanusi, A. *Metodologi Pnenelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.

Sawyers. *Internal Auditing Buku Satu Edisi Kelima*. Jakarta: Salemba Empat, 2005

Rahayu, Sri Lestari, *Bantuan Sosial di Indonesia Sekarang dan Kedepan*, Bandung: Fokus Media, 2012

Tarigan, Akmal, Azhari dkk. *Metodologi Penelitian Islam* Medan: La-Tansa Press, 2011

Ummul Mu'minin, Al-qur'an Dan Terjemahan Republik Indonesia, Jakarta: Wali, 2010

Widjaja, Drs. *Macam-macam Piutang*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Kutipan Jurnal :

Zuliastri, Fikanti, “*Dampak Perguliran Dana SPP PNPM Mandiri Pedesaan Terhadap Pengembangan UMKM di Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak Banten*”, Jurnal Ekonomi,

<http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/55801>, Tanggal 2 Oktober 2018.

Suci Andiani, “Analisis Tingkat Perputaran Piutang Berdasarkan Kolektibilitas Kredit”, <http://idr.iain-antasari.ac.id/6180SEMUA%20BAB.pdf>, Tanggal 13 Agustus 2018.

Wahyuni, Dewi *Pengendalian Internal COSO*, Diakses dari Wahyunidewi77.blogspot.com, Tanggal 6 April 2018.

LAMPIRAN

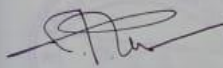
UNIT PENGELOLA KEGIATAN
KOLEKTIBILITAS LAPORAN PENGEMBALIAN PINJAMAN SPP
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERDESAAN
Periode 30 Nopember S/D 31 Desember 2016

Kecamatan : Medang Deras
Kabupaten : Batu Bara
Provinsi : Sumatera Utara

No	Nama Desa	Saldo Pinjaman Bulan Ini	Angsuran Pokok	Angsuran Pokok	Angsuran pokok	Angsuran	Angsuran
			Lancar (Tanpa Tunggakan) (Kolektibilitas 1)	Menunggak 1 S/d 2 Kali (Kolektibilitas 2)	Menunggak 1 S/d 4 Kali (Kolektibilitas 3)	Menunggak 5 S/d 6 Kali (Kolektibilitas 4)	Menunggak Diatas 6 Kali (Kolektibilitas 5)
1	Pematang Cengkring	18,375,000	11,750,000	875,000	5,750,000		
2	Pakam	36,620,000	33,010,000	1,060,000	2,550,000		
3	Mandarsah	14,900,000					
4	Tanjung Sigoni	85,455,000	63,900,000	8,555,000		13,000,000	
5	Durian	153,645,000	150,795,000	2,850,000	10,720,000		
6	Nenassiam	78,767,000	-	13,690,000	17,563,000		47,514,000
7	P. Dodek Baru	208,771,000	96,840,000	33,184,000	55,381,000	8,566,000	14,800,000
8	Pagurawan	228,030,000	201,740,000	1,542,000	24,748,000		
9	Sidomulyo	38,607,000	-	11,497,000	8,870,000	18,240,000	
10	Lalang	16,960,000	-	4,960,000	12,000,000		
11	Pangkalan Dodek	206,878,000	102,145,000	8,135,000	43,998,000	40,200,000	12,400,000
12	Medang	35,396,000	16,000,000	-		19,396,000	
13	Medang Baru	4,700,000	4,700,000				
14	Sei Buah Keras	43,980,000	-	12,340,000	8,050,000	23,590,000	
15	Sei Rakyat	36,115,000	36,115,000				
16	Sei Raja	14,300,000	13,850,000	450,000			
17	Pakam Raya	45,394,000	42,900,000	150,000	2,344,000		
18	Aek Nauli	91,568,000	74,815,000	2,320,000	11,408,000	3,025,000	
Total		1,358,461,000	848,560,000	101,608,000	203,382,000	126,017,000	74,714,000


Tingkat Kolektibilitas	Cadangan Resiko Penghapusan 1	Jumlah Pinjaman 2	Jumlah Cadangan Penghapusan 3 = 1 x 2
Kolektibilitas I	1%	848,560,000	8,485,600
Kolektibilitas II	10%	101,608,000	10,160,800
Kolektibilitas III	25%	203,382,000	50,845,500
Kolektibilitas IV	50%	126,017,000	63,008,500
Kolektibilitas VI	100%	74,714,000	74,714,000
Total		1,354,281,000	207,214,400
Rasio Cadangan Penghapusan			6.5

Diketahui dan Disetujui Oleh


ASNAWI
BKAD Kec. Medang Deras



Medang Deras, 31 Desember 2016
Dibuat Oleh UPK Kecamatan


ARFAH
Bendahara

UNIT PENGELOLA KEGIATAN
KOLEKTIBILITAS LAPORAN PENGEMBALIAN PINJAMAN SPP
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERDESAAN
Periode 30 Nopember s/d 31 Desember 2015

Kecamatan : Medang Deras
Kabupaten : Batu Bara
Provinsi : Sumatera Utara

No	Nama Desa	Saldo Pinjaman Bulan Ini	Angsuran Pokok	Angsuran Pokok	Angsuran pokok	Angsuran	Angsuran
			Lancar	Menunggak	Menunggak	Menunggak	Menunggak
			(Tanpa Tunggakan) (Kolektibilitas 1)	1 S/d 2 Kali (Kolektibilitas 2)	3 S/d 4 Kali (Kolektibilitas 3)	5 S/d 6 Kali (Kolektibilitas 4)	Diatas 6 Kali (Kolektibilitas 5)
1	Pematang Cengkring	40,512,000	38,912,000	1,600,000			
2	Pakam	16,260,000	12,800,000	910,000	2,550,000		
3	Tanjung Sigoni	71,835,000	49,680,000	8,855,000		13,300,000	
4	Durian	120,220,000	120,220,000				
5	Nenassiam	85,257,000	-	10,845,000	13,188,000	12,370,000	48,854,000
6	P. Dodek Baru	268,467,000	147,490,000	20,455,000	18,628,000	56,238,000	25,656,000
7	Sidomulyo	39,459,000	-	12,820,000	7,499,000	19,140,000	
8	Lalang	34,460,000	17,500,000	6,330,000	10,630,000		
9	Pangkalan Dodek	211,509,000	152,238,000	13,874,000	16,340,000	29,057,000	
10	Medang	44,996,000	25,600,000	-		19,396,000	
11	Sel Buah Keras	57,120,000	16,600,000	13,490,000	23,500,000	3,530,000	
12	Sel Rakyat	12,800,000	12,800,000	-			
13	Pakam Raya	31,224,000	28,880,000		2,344,000		
14	Aek Nauli	75,018,000	74,700,000	318,000			
Total		1,109,137,000	697,420,000	89,497,000	94,679,000	153,031,000	74,510,000

Tingkat Kolektibilitas	Cadangan Resiko Penghapusan 1	Jumlah Pinjaman 2	Jumlah Cadangan Penghapusan 3 = 1 x 2
Kolektibilitas I	1%	697,420,000	6,974,200
Kolektibilitas II	10%	89,497,000	8,949,700
Kolektibilitas III	25%	94,679,000	23,669,750
Kolektibilitas IV	50%	153,031,000	76,515,500
Kolektibilitas VI	100%	74,510,000	74,510,000
Total		1,109,137,000	190,619,150
Rasio Cadangan Penghapusan			6

Diketahui dan Disetujui Oleh


ASNAWI
Ketua BKAD

Diketahui/disetujui

SUHARTINA
Ketua

Medang Deras, 31 Desember 2015
Dibuat Oleh UPK Kecamatan


ARFAH
Bendahara

**UNIT PENGELOLA KEGIATAN
KOLEKTIBILITAS LAPORAN PENGEMBALIAN PINJAMAN SPP
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERDESAAN
Periode 30 Nopember s.d 31 Desember 2017**

Kecamatan : Medang Deras
Kabupaten : Batu Bara
Provinsi : Sumatera Utara

No	Nama Desa	Saldo Pinjaman	Angsuran Pokok Lancar	Angsuran Pokok Menunggak	Angsuran pokok Menunggak	Angsuran Menunggak	Angsuran
		Bulan Ini	(Tanpa Tunggalan) (Kolektibilitas 1)	1 S/d 2 Kali (Kolektibilitas 2)	3 S/d 4 Kali (Kolektibilitas 3)	5 S/d 6 Kali (Kolektibilitas 4)	Menunggak Diatas 6 Kali (Kolektibilitas 5)
1	Pematang Cengkring	23,775,000	9,400,000	775,000		13,600,000	
2	Pakam	38,975,000	33,900,000	2,525,000	2,550,000		
3	Mandarsah	48,750,000	48,750,000				
4	Tanjung Sigoni	105,455,000	83,900,000				21,555,000
5	Durian	155,315,000	126,325,000	9,690,000		19,300,000	
6	Nenassiam	74,857,000	-		7,608,000	28,964,000	38,285,000
7	P. Dodek Baru	313,294,000	139,590,000	19,417,000	68,809,000	39,001,000	46,477,000
8	Pagurawan	432,828,000	305,490,000	25,065,000	13,473,000	57,580,000	31,220,000
9	Sidomulyo	38,607,000	-	6,650,000	31,957,000		
10	Lalang	18,535,000	1,575,000				16,960,000
11	Pangkalan Dodek	220,198,000	109,315,000	13,811,000	21,484,000	50,225,000	25,363,000
12	Medang	76,371,000	27,200,000		29,775,000		19,396,000
13	Medang Baru	4,500,000	4,500,000				
14	Sei Buah Keras	42,980,000	-	11,040,000	25,470,000	6,470,000	
15	Sei Rakyat	57,500,000	38,800,000	850,000	17,850,000		
16	Sei Raja	14,000,000	7,050,000	4,300,000	2,650,000		
17	Pakam Raya	117,744,000	115,400,000				2,344,000
18	Aek Nauli	65,498,000	31,000,000		8,240,000	7,343,000	18,915,000
Total		1,849,182,000	1,082,195,000	94,123,000	229,866,000	222,483,000	220,515,000

Tingkat Kolektibilitas	Cadangan Resiko Penghapusan 1	Jumlah Pinjaman 2	Jumlah Cadangan Penghapusan 3 = 1 x 2
Kolektibilitas I	1%	1,082,195,000	10,821,950
Kolektibilitas II	10%	94,123,000	9,412,300
Kolektibilitas III	25%	229,866,000	57,466,500
Kolektibilitas IV	50%	222,483,000	111,241,500
Kolektibilitas VI	100%	220,515,000	220,515,000
Total		1,849,182,000	409,457,250
Rasio Cadangan Penghapusan			5

Diketahui dan Disetujui Oleh

A.S.N.A.W.I
Ketua BKAD
Kec. Medang Deras - Kab. Batu Bara

Diketahui/disetujui

SUHARTINA
Ketua
Kec. Medang Deras - Kab. Batu Bara

Medang Deras, 31 Desember 2017
Dibuat Oleh UPK Kecamatan


A.R.F.A.H
Bendahara

Foto Data Kolektibilitas UPK PNPM Mandiri Bagian SPP Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara Periode Desember 2015 s/d 2017



Foto Sesi Wawancara dan Foto Bersama dengan Pihak UPK PNPM Mandiri
Bagian SPP Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara

Hasil Wawancara dengan Pihak UPK PNPM Mandiri Bagian SPP
Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara.

Pertanyaan 1: Bagaimana sistem pengendalian intern piutang yang diterapkan di PNPM Mandiri pedesaan kec. Medang Deras ini ?

Subjek UPK I

Nama Subjek : Suhartina
Jabatan : Ketua UPK
Umur : 40 tahun

Penuturan hasil wawancara UPK I :

“Sistem yang digunakan yaitu sistem tanggung renteng yang maksudnya piutang diberikan secara kelompok dimana setiap kelompok ada ketua yang berfungsi untuk mengutip angsuran piutang setiap bulan dan diserahkan ke UPK.”

Subjek UPK II

Nama Subjek : Nur Aifah
Jabatan : Sekretaris
Umur : 31 Tahun

Penuturan Hasil wawancara UPK II :

“ Sistemnya tanggung renteng, hutangnya ditanggung bersama oleh tiap-tiap kelompok dengan di koordinir masing-masing ketua kelompok, jadi bila ada yang menunggak dalam pembayaran maka akan dibayarkan sementara oleh kelompok.”

Subjek UPK III

Nama Subjek : Arfah
Jabatan : Bendahara
Umur : 38 Tahun

Penuturan hasil wawancara UPK III :

“ Sama seperti yang dikatakan kak Aifah dan Kak Suhartina ya kalo sistemnya disini tanggung renteng oleh kelompok SPP jadi hutangnya ditanggung semua anggotanya, pembayaran angsuran diserahkan keketua kelompok, baru sesudah itu disetorkan kepada kami bagian UPK.

Pertanyaan ke 2 : Bagaimana syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan piutang ?

Subjek UPK I:

“ Syaratnya cukup mudah yaitu membuat kelompok SPP minimal 5 orang setelah itu membuat proposal pengajuan hutang dengan melampirkan fotocopy KTP, KK dan surat persetujuan dari keluarga, setelah proposal diajukan kelompok tersebut di verifikasi, setelah di verifikasi layak atau tidaknya kelompok tersebut untuk diberikan pinjaman jika layak, barulan membuat SPPB (Surat Perjanjian Pemberian Bantuan) barulah setelah itu dana SPP dapat dicairkan.”

Subjek UPK II:

“Syarat tentu ada yaitu membentuk kelompok terlebih dahulu, baru mengajukan proposal kelompok dengan menyertakan fotocopy KTP, KK dan surat persetujuan keluarga yang berguna apabila si penghutang mengalami suatu musibah yang tak diduga maka hutangnya akan diambil alih oleh keluarga atau ahli waris.”

Subjek UPK III:

“Syaratnya mengajukan proposal, fotocopy KTP, KK, surat persetujuan keluarga.

Pertanyaan ke 3 : Bagaimana mekanisme pembayaran piutang yang diterapkan ?

Subjek UPK I:

“Untuk pembayarannya dikoordinir oleh ketua kelompok masing-masing baru setelah itu disetor ke UPK.”

Subjek UPK II:

“Pembayaran iuran dibayar oleh anggota ke ketuanya dulu, setelah itu baru ketua yang menyetor ke UPK, dan apabila ada yang nunggak akan dibayarkan oleh kelompok dulu untuk menghindari tunggakan.”

Subjek UPK III:

“ Sama seperti yang dikatakan ketua kalo pembayaran biasanya dilakukan oleh ketua yang sudah mengutip dari anggota, baru diserahkan ke tim UPK, tak perlu repot-repot tiap-tiap anggota datang menyerahkannya langsung ke UPK cukup ketua saja yang mewakili.”

Pertanyaan ke 4: Apa tindakan yang dilakukan untuk mengurangi dan mengatasi risiko kredit macet ?

Subjek UPK I:

“ Caranya dengan sistem tanggung renteng tadi, jadi apabila ada yang tidak dapat membayar setelah jatuh tempo maka akan menjadi tanggung jawab bersama, jika kelompok tidak menyelesaikan hutangnya maka pencairan dana selanjutnya pada kelompok tersebut tidak bisa dilakukan sebelum melunasi hutang sebelumnya, diberi peringatan dari pihak kecamatan, door to door (mendatangi tiap-tiap anggota kelompok yang bermasalah dalam pembayaran) dan jika ada penyalahgunaan dana akan diselesaikan dengan cara kekeluargaan, namun jika tidak bisa

ditangani maka akan menempuh jalur hukum dan tidak diizinkan mengajukan pinjaman lagi.”

Subjek UPK II:

“ Biasanya jika ada yang menunggak kami akan door to door ke anggota kelompok yang bermasalah.”

Subjek UPK III:

“ Kalo soal menunggak pertama kami beri teguran atau langsung menemui kelompok yang menunggak tersebut, namun kalo tetap bandel gak mau bayar kami akan menggunakan jalur hukum dan yang menunggak tersebut tidak akan diberikan pinjaman lagi.”